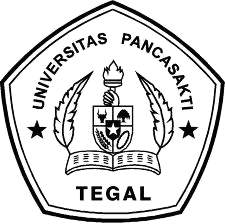
**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PILKADA**

**DI JAWA TENGAH TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

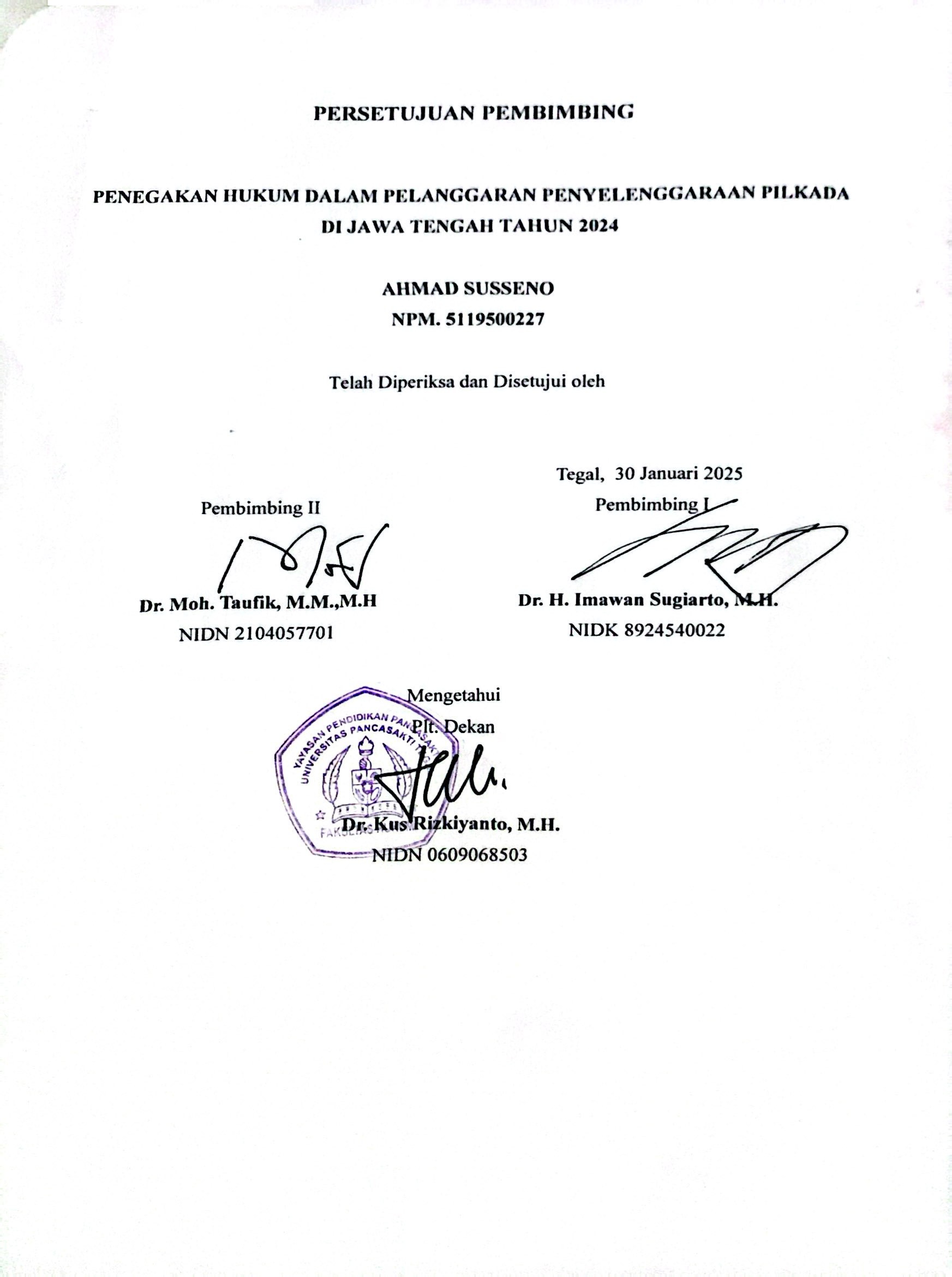
Oleh:

**AHMAD SUSSENO  
NPM. 5119500227**

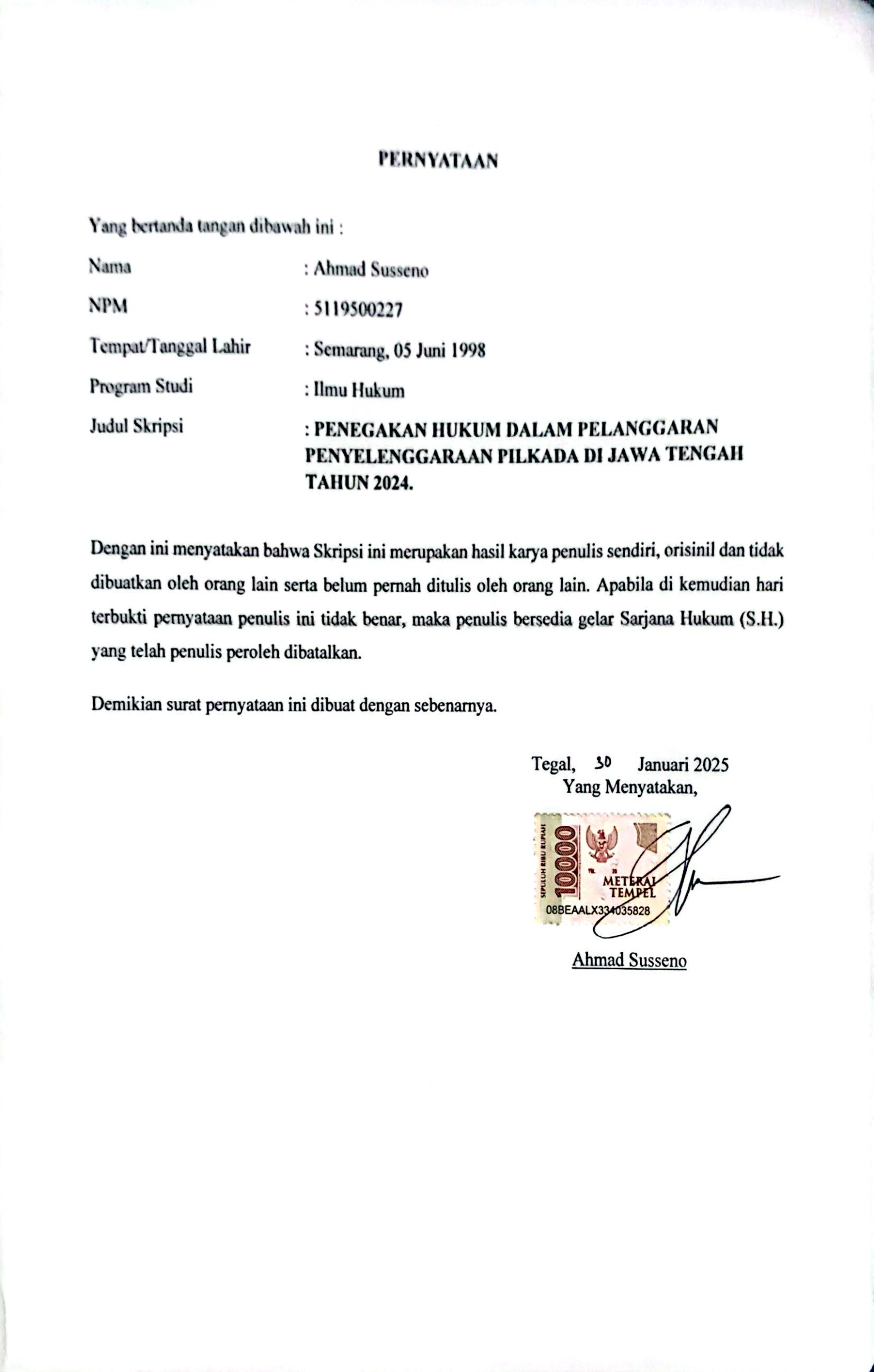
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**







**ABSTRAK**

**Susseno, Ahmad**. Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Di Jawa Tengah Tahun 2024. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2024.

Ukuran keberhasilan Negara demokratis salah satunya dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan di Jawa Tengah, banyak pelanggaran pemilu yang akhirnya tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum yang dilaksanakan, dan yang menjadi penyebab tidak efektifnya adalah lemahnya Undang-Undang yang mengatur proses penegakan hukum serta singkatnya waktu penanganan perkara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah dan (2) untuk mengetahui kendala-kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah diantaranya mekanisme pelaporan, pemantauan dan pengawasan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai ketentuan waktu yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah diantaranya yaitu dari segi keterbatasan waktu, tidak adanya upaya paksa dalam penegakan pelanggaran serta perbedaan pandangan mengenai kultur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pilkada, Pelanggaran Pemilu, dan Penegakan Hukum.

***ABSTRACT***

***Susseno, Ahmad****. Law Enforcement in Election Implementation Violations in Central Java. Tegal in 2024: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2024.*

*One measure of the success of a democratic country is seen from its success in organizing elections and enforcing the law. Law Number 7 of 2017 has regulated that there are 4 (four) institutions involved in handling election criminal cases, namely the Election Supervisory Committee (Panwaslu), Police, Prosecutor's Office, and Court. Based on the results found in Central Java, many election violations ultimately do not meet the elements of a crime and cannot be referred to the court. This causes the law enforcement that is carried out to be less effective, and the cause of the ineffectiveness is the weakness of the Law that regulates the law enforcement process and the short time for handling cases which makes it difficult for law enforcers to carry out their duties.*

*This study aims: (1) to describe the law enforcement of criminal acts of election violations in Central Java and (2) to determine the obstacles in law enforcement against criminal acts of election violations in Central Java. The type of research used is library research with an empirical normative legal research approach with an empirical juridical approach. The main data source used in this study is secondary data with a data collection method of library and document studies. The data analysis method used is a qualitative method analyzed normatively qualitatively.*

*The results of this study show: 1) The mechanisms in law enforcement of election violations in Central Java include reporting mechanisms, monitoring and supervision, investigation and prosecution, examination in court. Each of these stages has different time provisions based on the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. 2) The obstacles encountered in law enforcement of election violations in Central Java include time constraints, the absence of coercive efforts in enforcing violations and differences in views regarding legal culture.*

*Based on the results of this study, it is expected to be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords:*** *Election, Regional Election, Election Violations, and Law Enforcement.*

**MOTTO**

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.”

– Abraham Lincoln –

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

– QS Al Baqarah 286 –

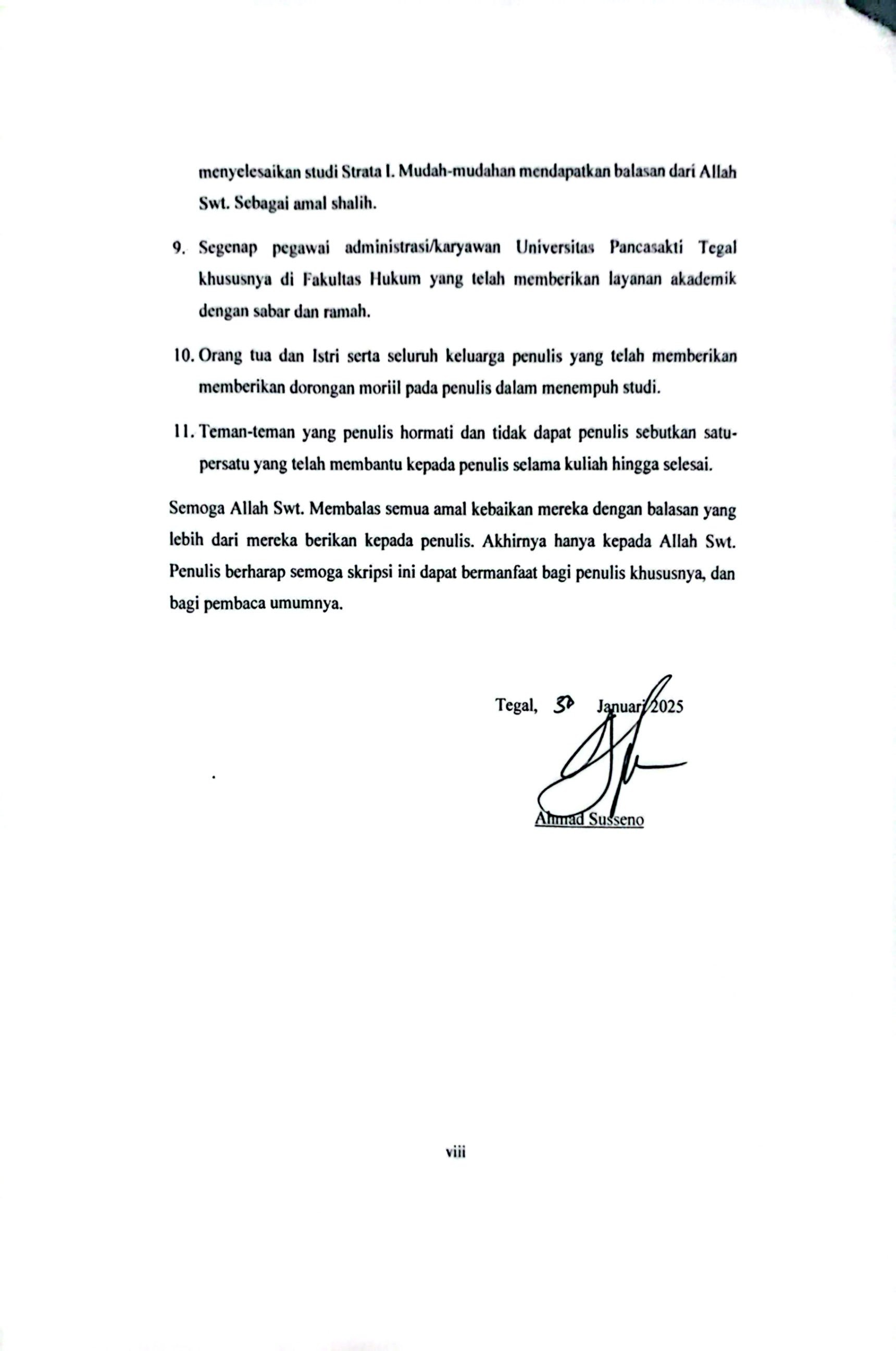
**PERSEMBAHAN**

1. **Kedua Orangtuaku** (Sutrisno & Sri Suswanti) Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti – hentinya memberikan kasih saying dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan mamah dan papah saya bias berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mamah dan papah harus ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup saya.
2. **Istriku** Nurussifa Silfana Achsa, S.Gz Terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah manjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih menjadi rumah yang tidak hanya berupa bangunan. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini
3. **Anakku** Shacetaa Lentera Madinia Seno Terima kasih sudah ikut serta menjadi penyemangat selama ini, terimakasih atas semangat, doa yang telah diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Kus Rizkiyanto, M.H. Selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh. Khamim, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Dr. H. Imawan Sugiarto, M.H. Dan Dr. Moh. Taufik, M.M.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bias menyelesaikan studi Strata I. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua dan Istri serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Teman-teman yang penulis hormati dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kepada penulis selama kuliah hingga selesai.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Januari 2024

Ahmad Susseno

.

Tegal, 12 Desember 2024

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** i

**HALAMAN PERSETUJUAN** ii

**ABSTRAK** iii

***ABSTRACT*** iv

**MOTTO** v

**PERSEMBAHAN** vi

**KATA PENGANTAR** vii

**DAFTAR ISI** ix

**BAB I PENDAHULUAN** 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Perumusan Masalah 19
3. Tujuan Penelitian 19
4. Urgensi Penelitian 19
5. Manfaat Penelitian 20
6. Manfaat Teoritis 20
7. Manfaat Praktis 20
8. Tinjauan Pustaka 21
9. Metode Penelitian 29
10. Jenis Penelitian 30
11. Pendekatan Penelitian 30
12. Sumber Data 30
13. Metode Pengumpulan Data 32
14. Metode Analisis Data 33
15. Sistematika Penulisan 34

**BAB II LANDASAN KONSEPTUAL** 36

1. Asas Negara Hukum 36
2. Tinjauan Tentang Pelanggaran 38
3. Konsep Penegakan Hukum 39
4. Tinjauan Tentang Pemilu 47
5. Pengertian Pemilu 47
6. Hak Pilih Dalam Pemilu 50
7. Asas-asas Pemilu 52
8. Tinjauan Umum Tentang Pilkada 53
9. Pengertian Umum Pilkada 53
10. Tujuan dan Fungsi Pilkada 56
11. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilu 59
12. Pengertian Tindak Pidana Pemilu 59
13. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu 60

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 66

1. Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana dalam Pilkada di Jawa Tengah 66
2. Penerapan Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada di Jawa Tengah 74
3. Kendala-Kendala dalam Penegakan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada di Jawa Tengah 87

**BAB IV SIMPULAN DAN SARAN** 101

1. Kesimpulan 101
2. Saran 102

**DAFTAR PUSTAKA** 103

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara yang mengandalkan kekuasaan semata (machstaat), hukum digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Dengan demikian, agar norma pemilu dapat menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan mendukung tujuan pemilu serta negara, asas-asas pemilu harus dijadikan pijakan dan panduannya.[[1]](#footnote-1)

Tercapainya pembangunan hukum akan mendukung terwujudnya tujuan hukum yang pada akhirnya berkontribusi pada perumusan tujuan bernegara. Namun, jika setiap undang-undang yang berlaku dirancang tanpa mengacu pada tujuan bernegara, maka akan sulit mencapai tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum. Era reformasi membawa harapan besar bagi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, kebebasan berpendapat, serta penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Semua ini diharapkan dapat membawa bangsa semakin dekat dengan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[2]](#footnote-2)

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat), yang mencerminkan tujuan demokratis dan nomokratis. Rechsstaat, yang berarti "negara hukum," memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep rule of law, yakni pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (demokrasi konstitusional). Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi (democratische rechtsstaat) sekaligus negara demokrasi yang berlandaskan prinsip rule of law.[[3]](#footnote-3)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengadopsi ciri-ciri negara hukum modern yang berlandaskan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang menyeluruh. Dalam sistem demokrasi, rakyat berpartisipasi dalam politik melalui pemilihan umum. Kualitas demokrasi tercermin dari pelaksanaan pemilu yang bebas, rahasia, umum, jujur, dan adil. Salah satu tujuan utama reformasi politik adalah menyelenggarakan pemilu secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan lainnya.[[4]](#footnote-4)

Dalam konsep negara hukum, prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi landasan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kedaulatan rakyat pada dasarnya menjadi sumber dari asas supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, asas negara hukum harus ditegakkan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtstaat). Kekuasaan semata tidak boleh dijadikan dasar dalam pembentukan, penafsiran, maupun penegakan hukum (machtsstaat). Prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi harus selalu dihormati dalam setiap upaya penegakan hukum. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dijalankan berdasarkan konstitusi (demokrasi konstitusional). Hal ini sejalan dengan identitas Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat) atau negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat.[[5]](#footnote-5)

Penegakan norma hukum beserta asas-asas yang mendasarinya merupakan inti dari tujuan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa hukum atau *legal spirit* yang mencerminkan dinamika yang terjadi selama proses legislasi. Selain itu, tercapainya keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh pemerintah dan para pemangku jabatan dengan naluri hukum (*legal feeling*) masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi proses pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut.[[6]](#footnote-6)

Pemilihan umum harus dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan membentuk pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mewujudkan cita-cita serta tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar pemilu dapat terlaksana secara konsisten, efektif, dan berdaya guna, penyelenggaraannya harus mencerminkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. Hak suara pemilih harus disalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar proses pemilu berjalan dengan baik. Selain itu, partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam pemilu sangat penting untuk mendukung keberhasilan pemilu sebagai alat kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi[[7]](#footnote-7)

“Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum.[[8]](#footnote-8) Tujuan pemilihan umum adalah untuk menerjemahkan keinginan rakyat ke dalam jabatan-jabatan di lembaga-lembaga pemerintah. Oleh karena itu, pejabat negara yang terpilih akan berusaha memenuhi amanat rakyat. Proses pemilihan umum harus dilakukan secara jujur dan adil untuk mengubah keinginan rakyat menjadi wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang sejalan dengan keinginan rakyat.[[9]](#footnote-9) Pemilihan umum menyediakan apa yang dikenal sebagai sistem peradilan pemilu untuk menjamin bahwa sistem tersebut dapat berfungsi secara jujur dan adil. Komponen utama dalam menjamin efisiensi dan keadilan pemilu adalah sistem peradilan pemilu. Prosedur penyelesaian sengketa pemilu dan komponen-komponen pencegahan merupakan bagian dari sistem peradilan pemilu.[[10]](#footnote-10) ”

Salah satu mekanisme untuk mengatur dan mengendalikan aliran kekuasaan dalam sebuah negara adalah melalui sistem pemilihan umum (Pemilu). Dalam sistem demokrasi, rekrutmen politik dilakukan secara terbuka melalui Pemilu, sehingga perpindahan kekuasaan tidak lagi bersifat turun-temurun seperti pada era monarki. Praktik kekuasaan yang sebelumnya tidak memiliki batas waktu secara teratur mendapat kritik dari perkembangan demokrasi di Barat, yang menekankan pentingnya pembatasan periode kekuasaan secara berkala. Pemilihan umum menjadi salah satu pilihan kelembagaan yang paling penting bagi negara-negara yang ingin menjaga kualitas dan kemajuan sistem politiknya. Hal ini karena logika politik yang mencakup proses administrasi, operasi birokrasi, serta pengembangan masyarakat sipil akan berkembang melalui sistem pemilu. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk memilih pemimpin negara secara inklusif, melibatkan seluruh warga negara.[[11]](#footnote-11)

Di Indonesia, pemilu pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi, terutama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa pemilihan Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian dari proses demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[12]](#footnote-12)

Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, diwajibkan untuk bertindak tertib dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemilih dan peserta pemilu juga berhak diperlakukan secara setara dan bebas dari kecurangan partai. Namun, meskipun ketentuan tersebut ada, masih terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menggagalkan penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, jujur, rahasia, umum, dan langsung. Tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan pemilu, tetap menjadi masalah yang nyata dalam proses ini.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota Bawaslu menjabat selama lima tahun, yang ditentukan berdasarkan sumpah atau janji jabatan mereka. Bawaslu merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum dimulainya tahapan pemilu, yaitu saat pendaftaran pemilih dibuka, dan akan dibubarkan setelah pelantikan pejabat terpilih[[14]](#footnote-14)

Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, pemilihan kepala daerah merupakan prosedur yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan melibatkan calon, pemilih (konstituen), dan lembaga pengawas. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk memilih "para politikus" yang akan berbicara mewakili rakyat dalam lembaga perwakilan yang dipilihnya. Melalui partai politik, individu atau kelompok tersebut dianggap memiliki kekuasaan atau tanggung jawab untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan jalan bagi suksesi kepemimpinan politik yang sah dan damai, untuk berkompromi bagi pandangan yang berlawanan, dan untuk mengaktifkan dan memobilisasi suara rakyat untuk mewakili kepentingan tertentu. Mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Di samping itu, stabilitas politik dan tujuan pembangunan nasional juga dianggap dapat terwujud secara utuh[[15]](#footnote-15)

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dibangun melalui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Komponen operasional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Pilkada sangat bergantung pada partisipasi warga negara. Setiap warga negara memiliki hak politik untuk terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan, memilih calon kepala daerah, atau memilih anggota legislatif daerah. Keterlibatan politik ini didasarkan pada prinsip kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan partisipasi masyarakat yang konstruktif. Pemilihan kepala daerah yang terbuka untuk semua warga negara mencerminkan kualitas dari pemilihan kepala daerah yang langsung. Istilah "hak pilih universal" digunakan untuk menggambarkan prinsip keterbukaan, yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih, dengan akses yang terbuka, menunjukkan bahwa hak untuk memilih bersifat benar-benar universal. Meskipun hak memilih dalam negara demokrasi tunduk pada persyaratan minimum, seperti kesehatan fisik dan mental yang memadai serta batasan usia, hal ini tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Langkah pertama dalam menegakkan hak pilih universal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung adalah melalui pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih sangat penting untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada, sesuai dengan tujuannya.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan hasil pemilu 2004, Indonesia dengan bangga menyelenggarakan pemilihan umum langsung untuk memilih anggota legislatif dan presiden, yang dilaksanakan secara demokratis dan tertib. Atas capaian tersebut, masyarakat mendorong pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat menuntut pemilihan umum kepala daerah atau wakil kepala daerah secara langsung. Menyikapi hal tersebut, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis,” sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu akhirnya membuat pendapat bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung menjadi kenyataan. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah menggantikan istilah sebelumnya yaitu Pilkada, sehingga jenis pemilihan di Indonesia bertambah menjadi pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan pemilihan umum kepala daerah. Diadopsinya asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, merupakan salah satu tanda bahwa pemilihan kepala daerah telah diatur dalam undang-undang pemilu.[[17]](#footnote-17)”

Tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum. Untuk mewujudkan cita-cita negara demokrasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dan pelanggaran terkait pemilu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan makna pemilu serta pemilihan umum sebagai sarana alokasi kekuasaan atau legitimasi rakyat. Beberapa masalah yang sering muncul dalam perencanaan pemilu di Indonesia, seperti apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, praktik politik uang, kampanye hitam, profesionalisme penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, serta konflik horizontal, sering kali menghambat tercapainya pemilu yang demokratis.[[18]](#footnote-18)

Bawaslu Jawa Tengah menangani 46 kasus pelanggaran selama Pilkada serentak di Jawa Tengah pada tahun 2024, yang merupakan bagian dari sejumlah pelanggaran administrasi dan pidana yang ditemukan. Sebelumnya, tim Bawaslu menemukan 43 kasus, sementara 12 kasus lainnya dilaporkan oleh pihak luar Bawaslu. Achmad Husain, Koordinator Bidang Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah, menjelaskan bahwa setelah diproses, hanya 46 kasus yang terbukti sebagai pelanggaran Pilkada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terdiri dari 21 pelanggaran administrasi, 12 pelanggaran hukum, dan 13 pelanggaran kode etik. Beberapa pelanggaran terkait netralitas kepala desa dan ASN termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Husain juga menyampaikan bahwa dua kasus pidana pemilu telah dinaikkan ke tahap penyidikan (SPKT) di Purbalingga dan Karanganyar. [[19]](#footnote-19)

Kasus di Purbalingga melibatkan Kepala Desa yang ditetapkan melanggar Pasal 71 dan Pasal 188, dengan keterangan yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon. Sementara di Karanganyar, terjadi perusakan perlengkapan kampanye. Selain itu, pelanggaran administrasi yang cukup banyak juga ditemukan, termasuk pelanggaran prosedur dan rekomendasi dari KPU. Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, KPU kemudian memberikan teguran atau sanksi kepada pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pelanggaran kode etik juga terjadi di jajaran penyelenggara pemilu, seperti Panwascam, PKD, KPPS, PPK, PPS, dan lain-lain. Pelanggaran hukum lainnya banyak terkait dengan masalah netralitas ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi ini termasuk peringatan, teguran, dan tindakan lainnya.[[20]](#footnote-20)

Bawaslu Jawa Tengah menggelar kegiatan pemetaan isu penting terkait Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) 2024 pada 17-18 Desember 2024 di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini diikuti oleh tiga Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu Bawaslu Kabupaten Pemalang, Bawaslu Kabupaten Klaten, dan Bawaslu Kota Semarang, yang berencana mengajukan PHP 2024. Dalam pembukaan acara, Diana Ariyanti, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah siap menghadapi PHP 2024. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut juga memiliki "pengalaman baik" dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Diana menekankan pentingnya menganalisis isu penting yang muncul untuk menyusun pernyataan tertulis, mengingat permohonan primer belum terpenuhi. Selain itu, analisis berdasarkan data pelanggaran dan tren pelanggaran di tiap daerah akan sangat membantu dalam penanganan PHP. Beberapa kejadian penting lainnya selama Pemilu 2024 juga dapat menjadi topik dalam petisi.

Dalam acara tersebut, Tim Biro Penyelesaian Sengketa dan Biro Hukum Bawaslu RI turut hadir. Tim Bawaslu RI memberikan penjelasan mengenai draft pernyataan tertulis PHP 2024 berdasarkan Petunjuk Teknis Bawaslu. Kesiapan dokumen yang dihasilkan dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kabupaten/Kota juga diperiksa dengan cermat. Hingga saat ini, telah ada empat permohonan PHP 2024 yang diajukan di Jawa Tengah. Tiga dari empat permohonan tersebut terkait dengan pemilihan Bupati/Wali Kota, sementara satu permohonan lainnya berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi masih mengkaji permohonan tersebut untuk memastikan kelengkapan dan perbaikannya. Jika permohonan dianggap lengkap, maka akan dimasukkan ke dalam Register Perkara Konstitusi Secara Elektronik (e-BRPK) pada 3 Januari 2025.[[21]](#footnote-21)

Fakta bahwa berbagai peristiwa yang terjadi dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu dengan sanksi yang sudah jelas, namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terkait pemilu. Meskipun dibentuknya Gakkumdu (Sentra Gakkumdu) menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana pemilu, dalam kenyataannya, hanya sebagian kecil kasus yang ditangani melalui jalur hukum. Gakkumdu sendiri merupakan lembaga yang menyatukan pengetahuan dan pendekatan dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana pemilu. Anggota Gakkumdu terdiri dari jaksa penuntut umum dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, ironisnya, meskipun pelanggaran pemilu terjadi secara luas, hanya sedikit kasus yang benar-benar diproses secara hukum. Beberapa pelanggaran, meskipun serupa di berbagai wilayah, tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya, atau bahkan ada yang tampak tidak diskriminatif. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan transparan.[[22]](#footnote-22)

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 476 sampai dengan Pasal 484 mengatur tentang tata cara penanganan tindak pidana pemilu. Pasal 476 UU tersebut menyatakan sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

Fakta bahwa berbagai peristiwa yang terjadi dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu dengan sanksi yang sudah jelas, namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terkait pemilu. Meskipun dibentuknya Gakkumdu (Sentra Gakkumdu) menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana pemilu, dalam kenyataannya, hanya sebagian kecil kasus yang ditangani melalui jalur hukum. Gakkumdu sendiri merupakan lembaga yang menyatukan pengetahuan dan pendekatan dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana pemilu. Anggota Gakkumdu terdiri dari jaksa penuntut umum dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, ironisnya, meskipun pelanggaran pemilu terjadi secara luas, hanya sedikit kasus yang benar-benar diproses secara hukum. Beberapa pelanggaran, meskipun serupa di berbagai wilayah, tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya, atau bahkan ada yang tampak tidak diskriminatif. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan transparan.

Laporan tertulis tentang dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. nama dan alamat pelapor;
2. pihak terlapor;
3. waktu dan tempat kejadian;
4. uraian tentang kejadian.

Kemudian laporan disampaikan kepada penyidik yang menurut Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 wajib menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Penyidik juga wajib menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu dalam penyidikan. Berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan waktu lima (5) hari.

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil keputusan mengenai pemeriksaan, persidangan, dan putusan perkara pidana pemilu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan tersebut diambil oleh majelis hakim khusus, yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang secara khusus ditunjuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Pengadilan negeri memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara pidana pemilu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penuntut umum menyerahkan berkas perkara. Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan banding diterima. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara pidana pemilu yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat memengaruhi hak pilih peserta pemilu, harus diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional.

Tindak pidana pemilu dilakukan oleh setiap orang, kelompok, atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar hukum, mengganggu, menghalangi, atau mengacaukan jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan oleh undang-undang. Lebih lanjut, tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan di luar undang-undang pemilu. Tindak pidana pemilu terjadi dan sering ditemukan pada proses penyelenggaraan pemilu, yang dimulai dari pendaftaran calon pemilih dan peserta, dilanjutkan dengan identifikasi calon pemilih dan peserta, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kampanye hingga pemungutan suara yang sarat dengan intrik politik berdasarkan kepekaan politik masing-masing pemilih. Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari tindak pidana pemilu.[[24]](#footnote-24)

Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam beberapa kategori tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu meliputi:[[25]](#footnote-25)

1. Memberikan keterangan yang menyesatkan pada saat pengisian data pribadi daftar pemilih (Pasal 488).
2. Kepala desa yang melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan pemilih (Pasal 490).
3. Orang yang mengganggu, menghalangi, atau mengacaukan jalannya kampanye pemilihan umum (Pasal 491).
4. Orang yang mencalonkan diri di luar masa kampanye pemilihan umum yang ditetapkan KPU (Pasal 492).
5. Kampanye pemilihan umum yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan tentang kampanye (Pasal 493).
6. Pemilih yang dengan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan pada laporan keuangan kampanyenya (Baca Pasal 496–497).
7. Setiap orang yang menghalangi orang lain untuk menggunakan hak pilihnya (Pasal 510).
8. Ketua KPU yang dengan sengaja mencetak surat suara lebih banyak dari yang dipersyaratkan. (Lihat Pasal 514).
9. Pemilih yang dengan sengaja memberikan suaranya beberapa kali dalam proses pemilihan. (Lihat Pasal 516).

Hal ini terlihat dari persyaratan dalam penyidikan tindak pidana pemilu, berbeda dengan tindak pidana umum, terdapat forum koordinasi tersendiri di samping teknik kerja yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan merupakan empat (empat) instansi yang menangani perkara tindak pidana pemilu. Untuk itu, Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Gakkumdu guna menangani perkara tindak pidana pelanggaran pemilu secara efektif.

Banyak pelanggaran pemilu yang pada akhirnya tidak memenuhi kriteria tindak pidana dan tidak dapat diajukan ke pengadilan, sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di Jawa Tengah. Lemahnya hukum yang mengatur proses penegakan hukum dan singkatnya waktu penanganan perkara membuat penegak hukum kesulitan dalam menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya menyebabkan menurunnya efektivitas penegakan hukum yang ada. Berdasarkan latar belakang informasi yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian tesis dengan judul "**Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada di Jawa Tengah Tahun 2024**".

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana dalam pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah tahun 2024?
2. Apa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah tahun 2024?
3. **Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan latar belakang yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah tahun 2024.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah tahun 2024.
3. **Urgensi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, urgensi penelitian ini bermula dari minimnya pengetahuan tentang alat bukti yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian, sehingga sejumlah tindakan yang diduga sebagai tindak pidana pemilu hanya sampai ke Panwaslu dan tidak sampai ke kepolisian pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Evaluasi kinerja Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana meningkatkan posisi ideal Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam rangka menjamin terselenggaranya demokrasi pada Pilkada yang diselenggarakan di Jawa Tengah Tahun 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) penyelenggara pemilu dalam menanggulangi tindak pidana pemilu yang banyak menimbulkan masalah.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memajukan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, dan lebih khusus lagi, kemampuan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum daerah di Jawa Tengah, sehingga dapat terwujud pemilu yang demokratis.

1. **Manfaat Praktis**

Diharapkan kajian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-haknya apabila terjadi kecurangan pemilu, dan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum untuk lebih mengoptimalkan upaya penindakan terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah.

1. **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka meneliti karya yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai langkah dalam pemetaan teoritis, penulis mencoba membuat temuan penelitian sebelumnya menjadi lebih jelas. Diharapkan posisi penelitian yang akan dilakukan akan menjadi lebih jelas dari hasil pemetaan teoritis ini, baik dari segi isi penelitian maupun bidang studinya. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan strategi penelitian ini:

1. Muhammad Oky Fauzi dan Nanik Prasetyoningsih, (2024), “Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara pencegahan pelanggaran pidana pemilu dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Setelah 24 tahun reformasi, masyarakat sangat menantikan pemilihan umum langsung. Pemilu merupakan proses peralihan kekuasaan dan digunakan untuk menilai kinerja partai politik selama lima tahun terakhir. Begitu pula dengan Pemilu 2024 yang berlangsung sejak Jumat, 29 Juli 2022 hingga Selasa, 13 Desember 2022, saat ini baru dalam tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik yang terlibat. Tujuan dari proses verifikasi partai politik adalah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan partai politik. Selain itu, prosedur ini menjamin partai politik, baik yang baru maupun yang sudah ada, siap dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pemilu. Diharapkan langkah selanjutnya akan berjalan lancar jika tahap pendaftaran dan verifikasi berhasil. Selain itu, dengan mencegah dan mengurangi pelanggaran pidana pemilu, verifikasi tersebut dapat membantu membuat pemilu 2024 menjadi kurang adil dan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara upaya pencegahan pelanggaran pidana pemilu dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui penggunaan metode penelitian normatif dan empiris dengan analisis kualitatif.

Studi ini menunjukkan bagaimana pemilih dapat menemukan pejabat publik yang berkualitas dan dapat dipercaya melalui verifikasi kandidat partai politik. Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus tegas dan bebas dari campur tangan yang dapat merusak standar pemilu dan demokrasi, karena prosedur dan metode verifikasi dapat menyebabkan kejahatan pemilu dan kecurangan pemilu. Agar peraturan pemilu tidak merusak semangat penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, masyarakat juga berkontribusi dengan melakukan pengawasan dan penetapan sasaran.

Kedaulatan rakyat dan cita-cita pemilu belum tercermin dalam pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para politikus bekerja sama untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Pemilu sebagai produk politik guna memastikan kelangsungan hidup masing-masing partai politik. Hal ini menyebabkan ditemukannya keterkaitan antara pemilu itu sendiri dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana pemilu oleh partai politik yang sudah mapan maupun yang baru muncul, terutama pada tahap pendaftaran dan verifikasi. Verifikasi terhadap calon anggota partai politik seharusnya dapat membantu masyarakat umum dalam membuat penilaian yang baik dan memilih calon terbaik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah persamaan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan analisis kualitatif yang mempunyai artian yaitu penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan peundang-undangan (statute approach) dan kualitatif yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan nyata di masyarakat untuk mendapatkan fakta-fakta dan data yang diperlukan. Studi pustaka dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, serta data tersebut diolah menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif dan komprehensif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni mengkaji keterkaitan antara pendaftaran dan verifikasi partai politik dengan pencegahan tindak pidana pemilu tahun 2024. Untuk mewujudkan sistem pemilu yang sempurna, penyelenggara pemilu juga harus menerapkan regulasi yang dapat meminimalisir, mencegah, dan melarang kecurangan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Sentra Gakkumdu digunakan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah.

1. Muhammad Nur Ramadhan, (2019), “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019”.

Laporan ini mengkaji penanganan dugaan tindak pidana pemilu serentak 2019. Terdapat sejumlah kekurangan dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu. Pertama, adanya kesenjangan pemahaman antarkomponen Sentra Gakkumdu, dan kedua, pola hubungan antar-Sentra Gakkumdu yang menjadi tanda adanya tantangan dalam penerapan hukum pidana pemilu. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan dalam proses demokrasi berikutnya, seperti penerapan undang-undang pemilu oleh Sentra Gakkumdu yang masih menjadi pertanyaan besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Penghentian perkara deklarasi yang melibatkan gubernur dan lima kepala daerah pengusung salah satu calon presiden di Sulawesi Barat (Sulbar) dan penghentian perkara dugaan pelanggaran pada tahap kampanye yang dilakukan oleh dua belas kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) merupakan dua contoh perkara yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu yang menggambarkan dinamika yang terjadi dalam penegakan hukum pemilu pada Pemilu 2019. Kedua kasus tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana penegakan hukum berjalan selama Pemilu 2019. Dasar analisis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yang mengkaji sejumlah sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan tambahan yang berkaitan dengan partai politik dari sisi kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu. Selain informasi dari sumber berita terkait lainnya, penelitian ini juga mempertimbangkan sumber hukum sekunder berupa literatur terkait. Selain memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran rinci tentang berbagai tantangan penegakan hukum pemilu yang dihadapi selama Pemilu 2019.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan analisis kualitatif merupakan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana Sentra Gakkumdu menegakkan hukum pemilu selama masa transisi demokrasi di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelanggaran pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah.

1. Muhammad Junaidi, (2020), “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan analisis kualitatif merupakan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana Sentra Gakkumdu menegakkan hukum pemilu selama masa transisi demokrasi di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelanggaran pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah.

According to the normative legal study, it is crucial to assess the Gakkumdu Center's capabilities, particularly by taking into account the institutions' philosophical capacities thus far, beginning with lessons learned from Indonesia's 2019 election implementation. According to the study's findings, the Election Supervisory Body (Bawaslu) needs to take on a central role within the Gakkumdu institution in order to minimize the subtleties of harmonizing synchronization, which are undoubtedly weaknesses in the 2019 Election's implementation. Bawaslu will do this through centralized coordination.

Berdasarkan kajian hukum normatif, penting untuk menilai kemampuan Sentra Gakkumdu, khususnya dengan mempertimbangkan kapasitas filosofis lembaga selama ini, dimulai dari pembelajaran dari penyelenggaraan Pemilu 2019 di Indonesia. Berdasarkan temuan kajian tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mengambil peran sentral dalam kelembagaan Gakkumdu untuk meminimalisir kekusutan dalam harmonisasi sinkronisasi yang selama ini menjadi kelemahan penyelenggaraan Pemilu 2019. Bawaslu akan melakukan hal tersebut melalui koordinasi yang terpusat.

1. Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arief Hidayat, dan Bambang Sadono, (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi hambatan dan praktik terbaik penegakan hukum terkait pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. Metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, "apabila berbagai variabel terpenuhi, terutama faktor hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat, dan budaya, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar." "Kesulitan menghadirkan alat bukti dalam upaya mengungkap kegiatan politik uang pada Pemilu 2019" menjadi salah satu tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam upayanya menanggulangi tindak pidana politik uang. Tantangan terkait alat bukti dalam perkara politik uang memerlukan prosedur penegakan hukum yang optimal. "Mewujudkan konsep dan cita-cita hukum yang diharapkan masyarakat harus menjadi landasan penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019".

The use of normative and empirical research methods with qualitative analysis is where this study and earlier research are similar. The distinction between this study and earlier research is that the former examines law enforcement's response to money politics violations during the 2019 election, whereas the latter examines law enforcement's response to criminal acts and violations of Central Java's regional election implementation.

1. Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, (2021), “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum”.
2. Rumusan ㅤmasalah ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini ㅤadalah ㅤbagaimana ㅤaturan ㅤhukum ㅤtentang ㅤpemilihan ㅤumum ㅤdi ㅤIndonesia, ㅤbagaimana ㅤperan ㅤdan ㅤkendala ㅤyang ㅤdihadapi ㅤKepolisian ㅤDaerah ㅤSumatera ㅤUtara ㅤ(POLDA-SU) ㅤdalam ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤtindak ㅤterhadap ㅤpidana ㅤpemilihan ㅤumum. ㅤDiperoleh ㅤhasil ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤterhadap ㅤperkara ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤdi ㅤatur ㅤdalam ㅤUndang-undang ㅤNo ㅤ7 ㅤTahun ㅤ2017 ㅤtentang ㅤPemilihan ㅤUmum. ㅤDalam ㅤUU ㅤPemilu ㅤdiatur ㅤbahwa ㅤsemua ㅤbentuk ㅤpelanggaran ㅤdalam ㅤpenyelenggaraan ㅤpemilu ㅤdilaporkan ㅤke ㅤbawaslu, ㅤkemudian ㅤbawaslu ㅤmelakukan ㅤpemeriksaan ㅤawal ㅤdengan ㅤberkoordinasi ㅤdengan ㅤinstansi ㅤpenegak ㅤhukum ㅤlainnya ㅤdalam ㅤGakumdu, ㅤselanjutnya ㅤmenyampaikan ㅤlaporan ㅤkepada ㅤkepolisian. ㅤPoldasu ㅤmenempatkan ㅤpenyidik ㅤyang ㅤmemiliki ㅤkualifikasi ㅤsebagaimana ㅤdinyatakan ㅤdalam ㅤUU ㅤPemilu ㅤsebagai ㅤpenyidik ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu. ㅤKepolisian ㅤjuga ㅤtelah ㅤberupaya ㅤuntuk ㅤsegera ㅤmenindaklanjuti ㅤsetiap ㅤlaporan ㅤpelanggaran ㅤpemilu ㅤdengan ㅤcara ㅤmelakukan ㅤpenyelidikan ㅤdan ㅤpenyidikan ㅤsesuai ㅤdengan ㅤwaktu ㅤyang ㅤditetapkan. ㅤKendala ㅤyang ㅤdihadapi ㅤkepolisian ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤterhadap ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu, ㅤyaitu ㅤadanya ㅤperbedaan ㅤpersepsi ㅤantar ㅤpenegak ㅤhukum ㅤdalam ㅤsentra ㅤGakkumdu ㅤterutama ㅤmengenai ㅤpenetakan ㅤperkara ㅤsebagai ㅤpidana ㅤdan ㅤperdata, ㅤadanya ㅤpembatasan ㅤwaktu ㅤpenanganan ㅤperkara ㅤoleh ㅤpenyidik ㅤkepolisian ㅤdari ㅤpenyidikan ㅤhingga ㅤpelimpahan ㅤberkas ㅤke ㅤpenuntut ㅤumum ㅤhanya ㅤ14 ㅤhari, ㅤserta ㅤkurangnya ㅤpersonil ㅤkepolisian ㅤuntuk ㅤmenangani ㅤperkara ㅤyang ㅤsemakin ㅤbanyak ㅤpada ㅤsaat ㅤpemilu.
3. Penggunaan ㅤmetode ㅤpenelitian ㅤnormatif ㅤdan ㅤempiris ㅤdengan ㅤanalisis ㅤkualitatif ㅤmerupakan ㅤpersamaan ㅤdari ㅤpenelitian ㅤini ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤterdahulu. ㅤPerbedaan ㅤpenelitian ㅤini ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤterdahulu ㅤadalah ㅤpenelitian ㅤini ㅤmengkaji ㅤrespons ㅤpenegak ㅤhukum ㅤterhadap ㅤpelanggaran ㅤpolitik ㅤuang ㅤpada ㅤpemilu ㅤ2019, ㅤsedangkan ㅤpenelitian ㅤini ㅤmengkaji ㅤrespons ㅤpenegak ㅤhukum ㅤterhadap ㅤtindak ㅤpidana ㅤdan ㅤpelanggaran ㅤpelaksanaan ㅤpilkada ㅤdi ㅤJawa ㅤTengah.
4. **Metode Penelitian**
5. **Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah. Dengan menekankan proses kontak komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti, penelitian kualitatif merupakan studi ilmiah yang berupaya memahami fenomena secara organik dalam konteks sosial. Penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan teori dan menerapkannya pada realitas terkini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata dan bukan angka. Penelitian ini berbasis kepustakaan, artinya menggunakan data sekunder. Penelusuran dokumen dapat digunakan untuk menemukan sumber data. Penelusuran sumber literatur atau data dari buku dan sumber lain merupakan proses penelitian kepustakaan.[[26]](#footnote-26)

1. **Pendekatan Penelitian**

Dalam rangka menguji dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, teori dan asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pemilu dan ranah keilmuan lain yang terkait dengan penegakan hukum pemilu dan Sentra Gakkumdu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. secara yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. secara empiris dengan menelaah data terkini yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari sudut pandang penerapan hukum. Dalam rangka memahami hukum sebagai kumpulan peraturan atau norma positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan cara mengevaluasi atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti sumber pustaka tentang penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Jawa Tengah.

1. **Sumber Data**

Proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari 2 sumber data, sebagai berikut:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Bagian dari pengumpulan data sekunder adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi dari perpustakaan, termasuk buku-buku, terbitan berkala seperti majalah ilmiah, dokumen, jurnal, artikel, internet, dan sumber perpustakaan lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber referensi saat menyusun karya ilmiah.

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, khususnya di Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, setelah bahan-bahan yang dikumpulkan melalui studi pustaka dinilai memadai. Partisipan yang menjadi sumber data penelitian ini. Penulis dalam analisis ini menggunakan tiga sumber data, yaitu :

1. Bahan hukum primer dan sumber data primer bersifat otoritatif, artinya memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan, notulen atau risalah resmi selama proses legislasi, dan putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum primer.
2. Semua terbitan hukum yang bukan merupakan naskah resmi menjadi sumber data sekunder. Buku teks, kamus hukum, terbitan berkala hukum, dan tafsir atas putusan pengadilan merupakan contoh terbitan hukum.
3. Sumber data tersier, atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, meliputi artikel, majalah, surat kabar, KBBI, Kamus Ensiklopedia Hukum, dan sumber daring yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[[27]](#footnote-27)
4. **Metode Pengumpulan Data**

Cakupan dan tujuan suatu penelitian pada dasarnya menentukan strategi pengumpulan data yang digunakan. Mengingat tujuan, metodologi, dan cakupan penelitian, tinjauan pustaka dan dokumenter berdasarkan data sekunder yang telah diperiksa digunakan sebagai metode pengumpulan data. Sumber data sekunder selalu menjadi fokus utama studi hukum normatif. Bahan hukum primer dan sekunder adalah dua kategori data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini : [[28]](#footnote-28)

1. Bahan ㅤhukum ㅤprimer, ㅤyaitu ㅤbahan-bahan ㅤhukum ㅤyang ㅤmengikat, ㅤseperti ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤNegara ㅤRepublik ㅤIndonesia ㅤTahun ㅤ1945 ㅤdan ㅤUndang-Undang ㅤRI ㅤNomor ㅤ7 ㅤtahun ㅤ2017 ㅤTentang ㅤPemilu.
2. Bahan-bahan ㅤhukum ㅤsekunder, ㅤyaitu ㅤbahan-bahan ㅤyang ㅤberhubungan ㅤdengan ㅤbahan ㅤhukum ㅤprimer ㅤdan ㅤmenjadi ㅤbahan ㅤanalisis ㅤdan ㅤmemahami ㅤbahan ㅤhukum ㅤprimer. ㅤBahan ㅤhukum ㅤsekunder ㅤini ㅤterdiri ㅤdari ㅤbuku-buku ㅤteks ㅤyang ㅤmemuat ㅤtulisan ㅤdan ㅤpendapat ㅤpara ㅤsarjana/ahli, ㅤhasil ㅤpenelitian, ㅤhasil ㅤseminar, ㅤjurnal ㅤyang ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤpermasalahan ㅤyang ㅤditeliti.
3. **Metode Analisis Data**

Cakupan dan tujuan suatu penelitian pada dasarnya menentukan strategi pengumpulan data yang digunakan. Berdasarkan tujuan, metodologi, dan cakupan penelitian, tinjauan pustaka dan dokumentasi berdasarkan analisis data sekunder digunakan sebagai metode pengumpulan data. Sumber data sekunder selalu menjadi fokus utama penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer dan sekunder merupakan dua kategori data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan asas hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian objek penelitian ini, guna memperoleh kebenaran dan memberikan gambaran faktual mengenai pokok bahasan penelitian ini, yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah sebagaimana ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan hasil temuan penelitian, kemudian disusun laporan penelitian.[[29]](#footnote-29)

Untuk mengetahui kebenaran dan menyajikan gambaran faktual mengenai pokok bahasan penelitian ini, yaitu penegakan hukum tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah sebagaimana ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian objek penelitian ini. Hasil penelitian tersebut kemudian disusun menjadi sebuah laporan penelitian.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan porsi penulisan penelitian tentang “Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Di Jawa Tengah”, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. “Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.”

BAB II: Tinjauan Konseptual**. “**Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian tentang konsep negara hukum, tinjauan umum tentang pemilu; tinjauan umum tentang pemilukada, pengertian tindak pidana pemilukada, dan jenis-jenis tindak pidana pelanggaran pada penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah.”

BAB III: Metode Penelitian**. “**Dalam bab ini berisi tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisa data.”

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data**. “**Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data mengenai bentuk tindak pidana pelanggaran pada penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana pelanggaran pada penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah, dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tindak pidana pelanggaran pada penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah.”

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisikan: kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**LANDASAN KONSEPTUAL**

1. **Asas ㅤNegara ㅤHukum**

Pemahaman ㅤyang ㅤmendalam ㅤtentang ㅤgagasan ㅤNegara ㅤHukum ㅤPancasila ㅤdapat ㅤdicermati ㅤdalam ㅤsejarah ㅤdan ㅤproses ㅤPembukaan ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤ1945 ㅤyang ㅤmenguraikan ㅤmaksud ㅤdan ㅤtujuan ㅤberdirinya ㅤnegara ㅤIndonesia, ㅤfalsafah, ㅤdan ㅤtujuannya. ㅤDari ㅤpenelitian ㅤdan ㅤpemahaman ㅤtersebut ㅤdapat ㅤdisimpulkan ㅤbahwa, ㅤselain ㅤmemiliki ㅤkesamaan ㅤdengan ㅤgagasan ㅤnegara ㅤhukum ㅤyang ㅤberkembang ㅤdi ㅤnegara ㅤlain, ㅤkonsep ㅤnegara ㅤhukum ㅤPancasila ㅤjuga ㅤberbeda. ㅤNilai-nilai ㅤyang ㅤbersumber ㅤdari ㅤdasar ㅤfalsafah, ㅤcita-cita ㅤhukum, ㅤdan ㅤseluruh ㅤproses ㅤpembentukan ㅤnegara ㅤIndonesia ㅤmerupakan ㅤunsur-unsur ㅤnegara ㅤhukum ㅤIndonesia. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤPembukaan ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤ1945 ㅤyang ㅤjuga ㅤmerumuskan ㅤPancasila, ㅤmemiliki ㅤkedudukan ㅤyang ㅤlebih ㅤtinggi ㅤdaripada ㅤsumber ㅤhukum ㅤlainnya ㅤdalam ㅤsistem ㅤhukum ㅤIndonesia. ㅤNilai ㅤabstrak ㅤyang ㅤpaling ㅤtinggi ㅤterdapat ㅤpada ㅤPembukaan ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤ1945, ㅤnilai-nilai ㅤyang ㅤterkandung ㅤdi ㅤdalamnya ㅤmenjadi ㅤpedoman ㅤdalam ㅤmenyusun ㅤpasal-pasal ㅤagar ㅤtidak ㅤmenyimpang ㅤdari ㅤasas-asas ㅤyang ㅤmenjadi ㅤlandasan ㅤfalsafah ㅤdan ㅤcita-cita ㅤnegara ㅤIndonesia.[[30]](#footnote-30)

Menurut ㅤPenjelasan ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤ1945 ㅤ(UUD ㅤ1945), ㅤIndonesia ㅤadalah ㅤnegara ㅤhukum. ㅤHal ㅤini ㅤdiperkuat ㅤlagi ㅤoleh ㅤPasal ㅤ1 ㅤayat ㅤ(3) ㅤUUD ㅤ1945 ㅤyang ㅤmenyatakan, ㅤ"Negara ㅤIndonesia ㅤadalah ㅤnegara ㅤhukum." ㅤKecuali ㅤdalam ㅤPenjelasan ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤ1945 ㅤyang ㅤdalam ㅤkalimatnya ㅤpenuh ㅤambiguitas, ㅤ"Indonesia ㅤadalah ㅤnegara ㅤyang ㅤberdasar ㅤatas ㅤhukum ㅤ(rehsstaat), ㅤbukan ㅤatas ㅤkekuasaan ㅤbelaka ㅤ(machtssaat)," ㅤdapat ㅤdipahami ㅤkerancuan ㅤgagasan ㅤdalam ㅤdimensi ㅤtata ㅤtertib ㅤ(aturan ㅤdalam ㅤpasal-pasal ㅤUUD ㅤ1945) ㅤbaik ㅤdalam ㅤPembukaan ㅤmaupun ㅤBatang ㅤTubuh ㅤUUD ㅤ1945. ㅤBerdasarkan ㅤrumusan ㅤini, ㅤIndonesia ㅤadalah ㅤnegara ㅤ"machtsstaat" ㅤ(primer) ㅤmaupun ㅤnegara ㅤ"rechsstaat" ㅤ(sekunder). ㅤHal ㅤini ㅤbertentangan ㅤdengan ㅤUUD ㅤRIS ㅤtahun ㅤ1949 ㅤdan ㅤUUDS ㅤtahun ㅤ1950 ㅤyang ㅤsecara ㅤtegas ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤIndonesia ㅤadalah ㅤnegara ㅤhukum ㅤyang ㅤdemokratis ㅤdalam ㅤPembukaan ㅤUUD ㅤdan ㅤPasal ㅤ1 ㅤayat ㅤ(1) ㅤbatang ㅤtubuh ㅤUUD.[[31]](#footnote-31)

Gagasan ㅤrechsstaat ㅤbersifat ㅤrevolusioner ㅤkarena ㅤmuncul ㅤdari ㅤperlawanan ㅤterhadap ㅤabsolutisme, ㅤsedangkan ㅤgagasan ㅤtentang ㅤnegara ㅤhukum ㅤberkembang ㅤseiring ㅤwaktu. ㅤDalam ㅤhal ㅤini, ㅤgagasan ㅤtentang ㅤnegara ㅤhukum ㅤdidasarkan ㅤpada ㅤsistem ㅤhukum ㅤcommon ㅤlaw, ㅤsedangkan ㅤgagasan ㅤtentang ㅤrechsstaat ㅤdidasarkan ㅤpada ㅤsistem ㅤhukum ㅤkontinental ㅤyang ㅤdikenal ㅤsebagai ㅤhukum ㅤperdata. ㅤAsas ㅤlegalitas ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤasas ㅤyang ㅤpaling ㅤkrusial ㅤdalam ㅤnegara ㅤhukum. ㅤKonsep ㅤdemokrasi ㅤdan ㅤnegara ㅤhukum ㅤ(cita-cita ㅤdemokrasi ㅤdan ㅤcita-cita ㅤrechsstaat) ㅤterkait ㅤerat ㅤdengan ㅤasas ㅤini. ㅤKonsep ㅤdemokrasi ㅤmengharuskan ㅤsemua ㅤundang-undang ㅤdisetujui ㅤoleh ㅤwakil ㅤrakyat ㅤdan ㅤmengutamakan ㅤkepentingan ㅤrakyat. ㅤKonsep ㅤini ㅤjuga ㅤmengharuskan ㅤnegara ㅤdan ㅤpemerintahan ㅤdilaksanakan ㅤsesuai ㅤdengan ㅤundang-undang ㅤdan ㅤmenjamin ㅤhak-hak ㅤdasar ㅤrakyat ㅤsebagaimana ㅤditentukan ㅤoleh ㅤundang-undang[[32]](#footnote-32)

Bagir ㅤManan ㅤberpendapat ㅤbahwa ㅤgagasan ㅤnegara ㅤhukum ㅤmodern ㅤmenggabungkan ㅤgagasan ㅤnegara ㅤkesejahteraan ㅤdan ㅤnegara ㅤhukum. ㅤMenurut ㅤteori ㅤini, ㅤperan ㅤnegara ㅤatau ㅤpemerintah ㅤtidak ㅤhanya ㅤterbatas ㅤpada ㅤmenjaga ㅤkeamanan ㅤdan ㅤketertiban ㅤumum. ㅤSebaliknya, ㅤnegara ㅤatau ㅤpemerintah ㅤbertanggung ㅤjawab ㅤuntuk ㅤmencapai ㅤkeadilan ㅤsosial, ㅤkesejahteraan ㅤumum, ㅤdan ㅤkemakmuran ㅤmaksimum ㅤbagi ㅤrakyat. ㅤDalam ㅤhal ㅤpenataan ㅤtatanan ㅤnegara, ㅤhukum ㅤadalah ㅤotoritas ㅤtertinggi. ㅤKenyataannya, ㅤhukum ㅤsendiri ㅤbertugas ㅤmenata ㅤnegara ㅤmenurut ㅤprinsip ㅤRule ㅤof ㅤLaw, ㅤNot ㅤof ㅤMan, ㅤyang ㅤkonsisten ㅤdengan ㅤnomocratie, ㅤatau ㅤgagasan ㅤbahwa ㅤhukum ㅤmemiliki ㅤkekuatan ㅤ"nomos". ㅤPrinsip-prinsip ㅤdemokrasi ㅤKonstitusi ㅤtidak ㅤboleh ㅤdiabaikan ㅤuntuk ㅤmempertahankan ㅤgagasan ㅤnegara ㅤhukum ㅤ(UUD).[[33]](#footnote-33)

1. **Tinjauan ㅤTentang ㅤPelanggaran**

Pelanggaran ㅤadalah ㅤtindakan ㅤmenyimpang ㅤyang ㅤdilakukan ㅤatas ㅤkemauan ㅤsendiri ㅤtanpa ㅤmengindahkan ㅤketentuan ㅤyang ㅤtelah ㅤditetapkan. ㅤSementara ㅤitu, ㅤTarmizi ㅤdalam ㅤsitusnya ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤ"salah ㅤsatu ㅤpenyebab ㅤutama ㅤterjadinya ㅤberbagai ㅤbentuk ㅤdan ㅤkesalahan ㅤadalah ㅤtidak ㅤdilaksanakannya ㅤketentuan ㅤatau ㅤaturan ㅤsecara ㅤkonsisten." ㅤBerdasarkan ㅤpengertian ㅤtersebut, ㅤpelanggaran ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤbentuk ㅤkesalahan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤatas ㅤinisiatif ㅤsendiri ㅤdengan ㅤmengabaikan ㅤketentuan ㅤyang ㅤtelah ㅤditetapkan.[[34]](#footnote-34)

"Istilah ㅤtersebut ㅤdiartikan ㅤsecara ㅤluas, ㅤsehingga ㅤmencakup ㅤpula ㅤhubungan ㅤyang ㅤbertentangan ㅤdengan ㅤkesusilaan ㅤatau ㅤyang ㅤdianggap ㅤpantas ㅤdalam ㅤpergaulan ㅤsosial," ㅤmenurut ㅤR. ㅤWirjono ㅤProjodikoro. ㅤSelain ㅤmelanggar ㅤhukum, ㅤpelanggaran ㅤjuga ㅤmencakup ㅤtindakan ㅤatau ㅤtidak ㅤtindakan ㅤyang ㅤmelanggar ㅤhak ㅤorang ㅤlain, ㅤyang ㅤbertentangan ㅤdengan ㅤkesusilaan ㅤatau ㅤkaidah ㅤkehati-hatian, ㅤkepatutan, ㅤdan ㅤtata ㅤtertib ㅤmasyarakat. ㅤPelanggaran ㅤjuga ㅤdapat ㅤdipahami ㅤsebagai ㅤseperangkat ㅤaturan ㅤhukum ㅤyang ㅤdimaksudkan ㅤuntuk ㅤmencegah ㅤatau ㅤmengendalikan ㅤperilaku ㅤberisiko, ㅤmeminta ㅤpertanggungjawaban ㅤorang ㅤatas ㅤkerugian ㅤyang ㅤtimbul ㅤakibat ㅤpergaulan ㅤsosial, ㅤdan ㅤmemberikan ㅤganti ㅤrugi ㅤkepada ㅤkorban ㅤmelalui ㅤsistem ㅤhukum ㅤyang ㅤtepat.[[35]](#footnote-35)

1. **Konsep ㅤPenegakan ㅤHukum**

Proses ㅤpelaksanaan ㅤatau ㅤpenegakan ㅤnorma ㅤhukum ㅤsecara ㅤpraktis, ㅤseperti ㅤperaturan ㅤlalu ㅤlintas ㅤatau ㅤhubungan ㅤhukum ㅤdalam ㅤkehidupan ㅤbermasyarakat ㅤdan ㅤbernegara ㅤdisebut ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤDari ㅤsudut ㅤpandang ㅤsubjek, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤdapat ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤbanyak ㅤsubjek ㅤatau ㅤdapat ㅤdiartikan ㅤsebagai ㅤusaha ㅤsubjek ㅤyang ㅤterbatas ㅤatau ㅤsempit ㅤuntuk ㅤmenegakkan ㅤhukum. ㅤDalam ㅤarti ㅤluas, ㅤsetiap ㅤsubjek ㅤhukum ㅤdalam ㅤsetiap ㅤhubungan ㅤhukum ㅤterlibat ㅤdalam ㅤproses ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤSiapa ㅤpun ㅤyang ㅤmengikuti ㅤpedoman ㅤnormatif ㅤatau ㅤbertindak ㅤatau ㅤtidak ㅤbertindak ㅤsesuai ㅤdengan ㅤstandar ㅤhukum ㅤyang ㅤrelevan, ㅤberarti ㅤmenegakkan ㅤaturan ㅤhukum. ㅤ

Dalam ㅤarti ㅤsempit, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤhanya ㅤdipahami ㅤsebagai ㅤupaya ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤaparat ㅤpenegak ㅤhukum ㅤtertentu ㅤuntuk ㅤmemastikan ㅤbahwa ㅤhukum ㅤberjalan ㅤsebagaimana ㅤmestinya. ㅤAparat ㅤpenegak ㅤhukum ㅤdiperbolehkan ㅤmenggunakan ㅤkekuasaan ㅤkoersif ㅤjika ㅤdiperlukan ㅤuntuk ㅤmemastikan ㅤhukum ㅤditegakkan. ㅤDalam ㅤarti ㅤyang ㅤlebih ㅤluas, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤmencakup ㅤnilai-nilai ㅤkeadilan ㅤdalam ㅤmasyarakat ㅤdan ㅤnilai-nilai ㅤkeadilan ㅤyang ㅤterkandung ㅤdalam ㅤperaturan ㅤformal. ㅤNamun ㅤdalam ㅤarti ㅤsempit, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤhanya ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenerapan ㅤperaturan ㅤresmi ㅤyang ㅤtertulis. ㅤSatjipto ㅤRahardjo ㅤberpendapat ㅤbahwa ㅤproses ㅤmewujudkan ㅤkeinginan ㅤhukum—yaitu ㅤgagasan ㅤbadan ㅤhukum ㅤyang ㅤmenciptakan ㅤhukum—adalah ㅤinti ㅤdari ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤProses ㅤbekerja ㅤuntuk ㅤmenegakkan ㅤatau ㅤmenjalankan ㅤnorma-norma ㅤhukum ㅤdalam ㅤpraktik, ㅤseperti ㅤaturan ㅤperilaku ㅤlalu ㅤlintas ㅤatau ㅤinteraksi ㅤhukum ㅤdalam ㅤkehidupan ㅤbermasyarakat ㅤdan ㅤbernegara, ㅤdikenal ㅤsebagai ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤMemastikan ㅤterselenggaranya ㅤpemilu ㅤyang ㅤadil ㅤmenjadi ㅤkrusial ㅤjika ㅤmempertimbangkan ㅤstandar ㅤakhir, ㅤyaitu ㅤkepatuhan ㅤdan ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤpemilu.[[36]](#footnote-36)

Dalam ㅤarti ㅤsempit, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤhanya ㅤdipahami ㅤsebagai ㅤupaya ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤaparat ㅤpenegak ㅤhukum ㅤtertentu ㅤuntuk ㅤmemastikan ㅤbahwa ㅤhukum ㅤberjalan ㅤsebagaimana ㅤmestinya. ㅤAparat ㅤpenegak ㅤhukum ㅤdiperbolehkan ㅤmenggunakan ㅤkekuasaan ㅤkoersif ㅤjika ㅤdiperlukan ㅤuntuk ㅤmemastikan ㅤhukum ㅤditegakkan. ㅤDalam ㅤarti ㅤyang ㅤlebih ㅤluas, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤmencakup ㅤnilai-nilai ㅤkeadilan ㅤdalam ㅤmasyarakat ㅤdan ㅤnilai-nilai ㅤkeadilan ㅤyang ㅤterkandung ㅤdalam ㅤperaturan ㅤformal. ㅤNamun ㅤdalam ㅤarti ㅤsempit, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤhanya ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenerapan ㅤperaturan ㅤresmi ㅤyang ㅤtertulis. ㅤSatjipto ㅤRahardjo ㅤberpendapat ㅤbahwa ㅤproses ㅤmewujudkan ㅤkeinginan ㅤhukum ㅤyaitu ㅤgagasan ㅤbadan ㅤhukum ㅤyang ㅤmenciptakan ㅤhukum—adalah ㅤinti ㅤdari ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤProses ㅤbekerja ㅤuntuk ㅤmenegakkan ㅤatau ㅤmenjalankan ㅤnorma-norma ㅤhukum ㅤdalam ㅤpraktik, ㅤseperti ㅤaturan ㅤperilaku ㅤlalu ㅤlintas ㅤatau ㅤinteraksi ㅤhukum ㅤdalam ㅤkehidupan ㅤbermasyarakat ㅤdan ㅤbernegara, ㅤdikenal ㅤsebagai ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤMemastikan ㅤterselenggaranya ㅤpemilu ㅤyang ㅤadil ㅤmenjadi ㅤkrusial ㅤjika ㅤmempertimbangkan ㅤstandar ㅤakhir, ㅤyaitu ㅤkepatuhan ㅤdan ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤpemilu.[[37]](#footnote-37)

Dalam ㅤarti ㅤsempit, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤhanya ㅤdipahami ㅤsebagai ㅤupaya ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤaparat ㅤpenegak ㅤhukum ㅤtertentu ㅤuntuk ㅤmemastikan ㅤbahwa ㅤhukum ㅤberjalan ㅤsebagaimana ㅤmestinya. ㅤAparat ㅤpenegak ㅤhukum ㅤdiperbolehkan ㅤmenggunakan ㅤkekuasaan ㅤkoersif ㅤjika ㅤdiperlukan ㅤuntuk ㅤmemastikan ㅤhukum ㅤditegakkan. ㅤDalam ㅤarti ㅤyang ㅤlebih ㅤluas, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤmencakup ㅤnilai-nilai ㅤkeadilan ㅤdalam ㅤmasyarakat ㅤdan ㅤnilai-nilai ㅤkeadilan ㅤyang ㅤterkandung ㅤdalam ㅤperaturan ㅤformal. ㅤNamun ㅤdalam ㅤarti ㅤsempit, ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤhanya ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenerapan ㅤperaturan ㅤresmi ㅤyang ㅤtertulis. ㅤSatjipto ㅤRahardjo ㅤberpendapat ㅤbahwa ㅤproses ㅤmewujudkan ㅤkeinginan ㅤhukum—yaitu ㅤgagasan ㅤbadan ㅤhukum ㅤyang ㅤmenciptakan ㅤhukum—adalah ㅤinti ㅤdari ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤProses ㅤbekerja ㅤuntuk ㅤmenegakkan ㅤatau ㅤmenjalankan ㅤnorma-norma ㅤhukum ㅤdalam ㅤpraktik, ㅤseperti ㅤaturan ㅤperilaku ㅤlalu ㅤlintas ㅤatau ㅤinteraksi ㅤhukum ㅤdalam ㅤkehidupan ㅤbermasyarakat ㅤdan ㅤbernegara, ㅤdikenal ㅤsebagai ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤMemastikan ㅤterselenggaranya ㅤpemilu ㅤyang ㅤadil ㅤmenjadi ㅤkrusial ㅤjika ㅤmempertimbangkan ㅤstandar ㅤakhir, ㅤyaitu ㅤkepatuhan ㅤdan ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤpemilu.

Prinsip ㅤmerupakan ㅤpedoman ㅤatau ㅤarahan ㅤmendasar ㅤyang ㅤharus ㅤdipatuhi ㅤoleh ㅤsemua ㅤorang. ㅤSuatu ㅤnegara ㅤyang ㅤmenjalankan ㅤpemerintahan ㅤyang ㅤdemokratis ㅤharus ㅤmematuhi ㅤhukum-hukum ㅤdasar ㅤtertentu ㅤyang ㅤdikenal ㅤsebagai ㅤasas-asas ㅤdemokrasi. ㅤSuatu ㅤnegara ㅤyang ㅤmenganut ㅤsistem ㅤdemokrasi ㅤdicirikan ㅤoleh ㅤsejumlah ㅤasas ㅤdasar ㅤyang ㅤmenjadi ㅤlandasan ㅤkehidupan ㅤberbangsa ㅤdan ㅤtercermin ㅤdalam ㅤpraktik ㅤketatanegaraan ㅤatau ㅤstruktur ㅤpemerintahannya. ㅤSecara ㅤumum, ㅤterdapat ㅤsedikit ㅤperbedaan ㅤdi ㅤantara ㅤpara ㅤahli ㅤdalam ㅤmengidentifikasi ㅤasas-asas ㅤdemokrasi; ㅤperbedaan ㅤistilah-istilah ㅤtersebut ㅤhanya ㅤsedikit. ㅤMisalnya, ㅤRidwan ㅤmengutip ㅤpernyataan ㅤVan ㅤWijk ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤberikut ㅤini ㅤadalah ㅤasas-asas ㅤdemokrasi:

1. Para ㅤwakil ㅤrakyat ㅤyang ㅤdipilih ㅤmelalui ㅤpemilihan ㅤumum ㅤyang ㅤbebas ㅤdan ㅤrahasia, ㅤbekerja ㅤsama ㅤuntuk ㅤmembuat ㅤkeputusan-keputusan ㅤpenting, ㅤtermasuk ㅤundang-undang.
2. Hasil ㅤpemilihan ㅤumum ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤmengisi ㅤjabatan-jabatan ㅤpemerintahan ㅤdan ㅤdewan ㅤperwakilan ㅤrakyat.
3. Keterbukaan ㅤpemerintahan.
4. Kesempatan ㅤuntuk ㅤmembela ㅤkepentingan ㅤmereka ㅤharus ㅤdiberikan ㅤkepada ㅤsiapa ㅤpun ㅤyang ㅤkepentingannya ㅤ(dilanggar) ㅤoleh ㅤtindakan ㅤpenguasa.
5. Setiap ㅤpilihan ㅤharus ㅤmelindungi ㅤkepentingan ㅤminoritas ㅤdan ㅤsedapat ㅤmungkin ㅤmenghindari ㅤkesalahan ㅤdan ㅤkebohongan.[[38]](#footnote-38)

Jika ㅤsetiap ㅤwarga ㅤnegara ㅤmemiliki ㅤkemampuan ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤbaik ㅤsecara ㅤaktif ㅤmaupun ㅤpasif, ㅤmaka ㅤpemilihan ㅤumum ㅤdianggap ㅤdemokratis. ㅤMeskipun ㅤada ㅤketerbatasan, ㅤpemilihan ㅤumum ㅤharus ㅤdiputuskan ㅤsecara ㅤdemokratis, ㅤyaitu ㅤmelalui ㅤundang-undang. ㅤPemilihan ㅤumum ㅤdianggap ㅤsebagai ㅤsimbol ㅤdan ㅤstandar ㅤdemokrasi ㅤdi ㅤsebagian ㅤbesar ㅤnegara ㅤdemokrasi. ㅤPemilihan ㅤumum ㅤadalah ㅤalat ㅤuniversal ㅤuntuk ㅤmengekspresikan ㅤkeinginan ㅤdan ㅤkepentingan ㅤrakyat ㅤdan ㅤuntuk ㅤmencapai ㅤkedaulatan ㅤmereka ㅤyang ㅤberupaya ㅤmendirikan ㅤpemerintahan ㅤyang ㅤsah. ㅤAda ㅤberbagai ㅤsistem ㅤpemilihan ㅤumum ㅤkarena ㅤpemilihan ㅤumum ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤmetode ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤwakil ㅤrakyat ㅤuntuk ㅤbertugas ㅤdi ㅤcabang ㅤlegislatif.

Skenario ㅤterbaik ㅤyang ㅤmungkin ㅤterjadi ㅤbagi ㅤpemerintahan ㅤyang ㅤdemokratis ㅤdi ㅤera ㅤmodern ㅤadalah ㅤpemilihan ㅤumum. ㅤBahkan ㅤdefinisi ㅤdasar ㅤdemokrasi ㅤadalah ㅤsistem ㅤpolitik ㅤdi ㅤmana ㅤpara ㅤpengambil ㅤkeputusan ㅤkolektif ㅤtertinggi ㅤdipilih ㅤmelalui ㅤpemilihan ㅤumum ㅤyang ㅤteratur, ㅤadil, ㅤdan ㅤjujur. ㅤSaat ㅤini, ㅤpemilihan ㅤumum ㅤberfungsi ㅤsebagai ㅤsumber ㅤkriteria ㅤuntuk ㅤmenentukan ㅤapakah ㅤsuatu ㅤnegara ㅤdemokratis ㅤatau ㅤtidak. ㅤSikap ㅤdan ㅤtindakan ㅤpersonel ㅤpenegak ㅤhukum ㅤmemainkan ㅤperan ㅤutama ㅤdalam ㅤmenciptakan ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤyang ㅤefektif. ㅤKarena ㅤkejujuran ㅤtidak ㅤmemiliki ㅤmodul, ㅤmaka ㅤkejujuran ㅤmerupakan ㅤkualitas ㅤyang ㅤpaling ㅤpenting ㅤuntuk ㅤditumbuhkan ㅤdalam ㅤsumber ㅤdaya ㅤmanusia. ㅤIntegritas ㅤdan ㅤkeimanan ㅤberdampak ㅤpada ㅤkejujuran. ㅤAkibatnya, ㅤpemerintah ㅤdituntut ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤketerampilan ㅤtenaga ㅤkerjanya ㅤsesuai ㅤdengan ㅤbidang ㅤpekerjaan ㅤdan ㅤkesejahteraan ㅤmereka, ㅤyang ㅤtermasuk ㅤmenilai ㅤsikap ㅤdan ㅤperilaku ㅤmereka ㅤagar ㅤmereka ㅤdapat ㅤberpikir ㅤjernih ㅤdan ㅤakurat.

Peraturan ㅤperundang-undangan ㅤyang ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤpemilu ㅤharus ㅤmelindungi ㅤproses ㅤpolitik ㅤdari ㅤpelanggaran, ㅤhambatan, ㅤpengaruh ㅤnegatif, ㅤkepentingan ㅤkhusus, ㅤpenipuan, ㅤkecurangan, ㅤintimidasi, ㅤdan ㅤsegala ㅤjenis ㅤkegiatan ㅤmelawan ㅤhukum ㅤatau ㅤpraktik ㅤkorupsi ㅤlainnya. ㅤPenyelenggara ㅤpemilu ㅤdan ㅤaparat ㅤpenegak ㅤhukum ㅤharus ㅤmenegakkan ㅤhukuman ㅤpidana ㅤdan ㅤnon-pidana ㅤatas ㅤpelanggaran. ㅤUndang-undang ㅤharus ㅤmemberikan ㅤkesempatan ㅤkepada ㅤpihak ㅤyang ㅤdirugikan ㅤuntuk ㅤmenggugat ㅤhasil ㅤpemilu ㅤdan ㅤmencari ㅤsolusi. ㅤPengaturan ㅤprosedur ㅤpengajuan ㅤkeberatan ㅤdan ㅤpelaporan ㅤpelanggaran ㅤdiperlukan. ㅤUndang-undang ㅤjuga ㅤharus ㅤmengatur ㅤbagaimana ㅤpelanggaran ㅤmempengaruhi ㅤhasil ㅤpemilu. ㅤKeadilan ㅤdan ㅤpenyelesaian ㅤmasalah ㅤharus ㅤtersedia ㅤbagi ㅤsetiap ㅤpihak ㅤyang ㅤmengajukan ㅤkeberatan, ㅤmenggugat ㅤhasil ㅤpemilu, ㅤatau ㅤmelanggar ㅤhak-hak ㅤpartai ㅤpolitik ㅤlain. ㅤSetidaknya ㅤada ㅤtiga ㅤfaktor ㅤyang ㅤperlu ㅤselalu ㅤdipertimbangkan ㅤsecara ㅤcermat ㅤdalam ㅤhal ㅤpenerapan ㅤundang-undang ㅤpemilu.[[39]](#footnote-39)

Pertama-tama, ㅤhal ㅤini ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤpengamanan ㅤproses ㅤpolitik ㅤterhadap ㅤpelanggaran, ㅤhambatan, ㅤpengaruh ㅤnegatif, ㅤkepentingan ㅤkhusus, ㅤpenipuan, ㅤtipu ㅤdaya, ㅤintimidasi, ㅤdan ㅤsegala ㅤjenis ㅤkegiatan ㅤmelawan ㅤhukum ㅤatau ㅤpraktik ㅤkorupsi ㅤlainnya. ㅤPelanggar ㅤharus ㅤmenghadapi ㅤhukuman ㅤpidana ㅤdan ㅤnon-pidana. ㅤKlausul ㅤini ㅤmenyoroti ㅤhukum ㅤsubstantif ㅤatau ㅤmaterial, ㅤtermasuk ㅤberbagai ㅤjenis ㅤpelanggaran ㅤdan ㅤhukumannya. ㅤ"Perlindungan ㅤproses ㅤpemilu ㅤdari ㅤpenipuan" ㅤadalah ㅤhasil ㅤyang ㅤdiinginkan. ㅤPencegah ㅤpelanggaran ㅤatau ㅤpenipuan ㅤyang ㅤmembahayakan ㅤintegritas ㅤpemilu ㅤadalah ㅤpenegakan ㅤhukum. ㅤSetiap ㅤpelanggaran ㅤperlu ㅤdiperbaiki. ㅤIntegritas ㅤini, ㅤyang ㅤsecara ㅤeksplisit ㅤdisebutkan ㅤdalam ㅤkerangka ㅤdasar ㅤhukum, ㅤdapat ㅤditegakkan ㅤoleh ㅤberbagai ㅤlembaga ㅤdengan ㅤmenggunakan ㅤprosedur ㅤmereka ㅤsendiri. ㅤ

Kedua, ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤhak ㅤuntuk ㅤmenggugat ㅤhasil ㅤpemilu ㅤdan ㅤpihak ㅤyang ㅤmerasa ㅤdirugikan ㅤuntuk ㅤmenyelesaikan ㅤsengketa. ㅤUndang-undang ㅤperlu ㅤmengatur ㅤhal ㅤini. ㅤSejumlah ㅤhal ㅤpenting ㅤharus ㅤdiatur ㅤdalam ㅤproses ㅤgugatan ㅤpemilu. ㅤKlausul-klausul ㅤini ㅤmenyoroti ㅤhukum ㅤacara, ㅤseperti ㅤhak ㅤpihak ㅤyang ㅤmerasa ㅤkeberatan ㅤ(baik ㅤpartai ㅤpolitik ㅤmaupun ㅤkandidat) ㅤuntuk ㅤmemprotes ㅤhasil ㅤpemilu ㅤguna ㅤmempertahankan ㅤhak-haknya. ㅤHarus ㅤada ㅤtenggat ㅤwaktu ㅤuntuk ㅤmenyelesaikan ㅤkasus-kasus ㅤterkait ㅤpemilu. ㅤProsedur ㅤyang ㅤberlarut-larut ㅤpada ㅤakhirnya ㅤdapat ㅤmengakibatkan ㅤketidakpastian ㅤdan ㅤketidakstabilan ㅤpolitik ㅤyang ㅤrumit. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤsangat ㅤpenting ㅤagar ㅤkeberatan ㅤpemilu ㅤditangani ㅤsecepat, ㅤseefektif, ㅤdan ㅤsetransparan ㅤserta ㅤakuntabel ㅤmungkin. ㅤLebih ㅤjauh, ㅤsangat ㅤpenting ㅤagar ㅤgugatan ㅤhukum ㅤtidak ㅤmengganggu ㅤproses ㅤpemilu. ㅤKetidakstabilan ㅤpolitik ㅤdan ㅤsipil ㅤdalam ㅤtatanan ㅤnegara ㅤjuga ㅤakan ㅤterjadi ㅤakibat ㅤketerlambatan ㅤpembentukan ㅤparlemen ㅤdan ㅤpemerintahan.

Ketiga, ㅤtentang ㅤbagaimana ㅤpelanggaran ㅤmempengaruhi ㅤhasil ㅤpemilu. ㅤBentuk ㅤketentuan ㅤini ㅤharus ㅤditetapkan ㅤdengan ㅤundang-undang. ㅤDalam ㅤhal ㅤini, ㅤditekankan ㅤapakah ㅤnegara ㅤmemiliki ㅤkerangka ㅤhukum ㅤyang ㅤmengintegrasikan ㅤperaturan ㅤtentang ㅤdampak ㅤpelanggaran ㅤdengan ㅤhasil ㅤpemilu. ㅤTanpa ㅤklausul ㅤini, ㅤputusan ㅤpidana ㅤmengenai ㅤpelanggaran ㅤterkait ㅤpemilu ㅤtidak ㅤakan ㅤmempengaruhi ㅤhasil ㅤpemilu ㅤdan ㅤtidak ㅤakan ㅤberguna. ㅤKarena ㅤkelemahan ㅤketentuan ㅤini, ㅤbeberapa ㅤpeserta ㅤakan ㅤterdorong ㅤuntuk ㅤmemobilisasi ㅤsuara ㅤmelalui ㅤcara ㅤilegal ㅤatau ㅤnegatif ㅤkarena ㅤkonsekuensi ㅤpelanggaran ㅤseperti ㅤkemungkinan ㅤkehilangan ㅤkursi ㅤyang ㅤtelah ㅤdimenangkan ㅤtidak ㅤberat.

Uraian ㅤdi ㅤatas ㅤmengarah ㅤpada ㅤkesimpulan ㅤbahwa ㅤketentuan ㅤundang-undang ㅤpemilu ㅤtentang ㅤpelanggaran ㅤpemilu ㅤsangat ㅤpenting ㅤkarena ㅤmasih ㅤterdapat ㅤpeluang ㅤdan ㅤmotif ㅤuntuk ㅤmelanggar ㅤundang-undang ㅤtersebut. ㅤKetiadaan ㅤketentuan ㅤtersebut ㅤsering ㅤdimanfaatkan ㅤoleh ㅤpeserta ㅤpemilu ㅤtertentu. ㅤPihak ㅤlain ㅤdan ㅤmasyarakat ㅤluas ㅤmenderita ㅤkerugian ㅤakibat ㅤperilaku ㅤtidak ㅤpantas ㅤtersebut, ㅤyang ㅤmenunjukkan ㅤkelemahan ㅤproses ㅤdemokrasi. ㅤSelain ㅤmelanggar ㅤhukum, ㅤperilaku ㅤtidak ㅤpantas ㅤselama ㅤproses ㅤpemilu ㅤmerupakan ㅤpengkhianatan ㅤterhadap ㅤkepercayaan ㅤpublik.

1. **Tinjauan ㅤUmum ㅤTentang ㅤPemilu**
2. **Pengertian ㅤPemilu**

Pemilihan ㅤumum ㅤsecara ㅤumum ㅤdiartikan ㅤsebagai ㅤproses ㅤpemilihan ㅤcalon ㅤuntuk ㅤjabatan ㅤpolitik ㅤtertentu. ㅤPemilihan ㅤumum ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤcara ㅤuntuk ㅤmenjalankan ㅤkedaulatan ㅤrakyat ㅤdalam ㅤNegara ㅤKesatuan ㅤRepublik ㅤIndonesia ㅤyang ㅤberdasarkan ㅤPancasila ㅤdan ㅤketentuan ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤRepublik ㅤIndonesia ㅤTahun ㅤ1945. ㅤHal ㅤini ㅤtertuang ㅤdalam ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ15 ㅤTahun ㅤ2011 ㅤ(selanjutnya ㅤditulis ㅤUndang-Undang ㅤ15/2011) ㅤtentang ㅤPenyelenggara ㅤPemilihan ㅤUmum ㅤdan ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ8 ㅤTahun ㅤ2012 ㅤ(selanjutnya ㅤditulis ㅤUndang-Undang ㅤ8/2012) ㅤtentang ㅤPemilihan ㅤUmum ㅤDPR, ㅤDPD, ㅤdan ㅤDPRD.[[40]](#footnote-40)

Perubahan ㅤyang ㅤcukup ㅤsignifikan ㅤdalam ㅤkonsepsi ㅤUUD ㅤ1945 ㅤtentang ㅤkedaulatan ㅤrakyat. ㅤOrang ㅤyang ㅤsesungguhnya ㅤmemegang ㅤkekuasaan ㅤtertinggi ㅤatau ㅤsupremasi ㅤhukum ㅤmengalami ㅤperubahan ㅤyang ㅤmendasar. ㅤMenurut ㅤSoewoto ㅤMulyosudarmo, ㅤPasal ㅤ1 ㅤAyat ㅤ2 ㅤUUD ㅤ1945 ㅤdiubah ㅤuntuk ㅤmencerminkan ㅤkeadaan ㅤfaktual ㅤyang ㅤmengatur ㅤkekuasaan ㅤtertinggi. ㅤ“Kedaulatan ㅤberada ㅤdi ㅤtangan ㅤrakyat ㅤdan ㅤdilaksanakan ㅤsepenuhnya ㅤoleh ㅤMajelis ㅤPermusyawaratan ㅤRakyat” ㅤmerupakan ㅤrumusan ㅤawal ㅤPasal ㅤ1 ㅤayat ㅤ(2) ㅤUUD ㅤ1945. ㅤPerubahan ㅤmenjadi ㅤ“Kedaulatan ㅤberada ㅤdi ㅤtangan ㅤrakyat ㅤdan ㅤdilaksanakan ㅤmenurut ㅤUndang-Undang ㅤDasar” ㅤini ㅤmenunjukkan ㅤterjadinya.[[41]](#footnote-41)

Agar ㅤkedaulatan ㅤrakyat ㅤdapat ㅤterwujud, ㅤmaka ㅤsistem ㅤdemokrasi ㅤharus ㅤmenjamin ㅤketerlibatan ㅤrakyat ㅤsecara ㅤaktif ㅤdalam ㅤmengorganisasikan, ㅤmerencanakan, ㅤmelaksanakan, ㅤmengawasi, ㅤdan ㅤmengevaluasi ㅤpenggunaan ㅤkekuasaan. ㅤPelaksanaan ㅤpelibatan ㅤrakyat ㅤsecara ㅤpenuh ㅤtidak ㅤlagi ㅤdilakukan ㅤmelalui ㅤlembaga ㅤnegara ㅤMajelis ㅤPermusyawaratan ㅤRakyat ㅤsebagaimana ㅤdalam ㅤUUD ㅤ1945 ㅤsebelum ㅤamandemen, ㅤtetapi ㅤpelaksanaannya ㅤharus ㅤdisusun ㅤsesuai ㅤdengan ㅤUUD ㅤ1945 ㅤdan ㅤketentuan-ketentuannya. ㅤSetelah ㅤamandemen, ㅤterdapat ㅤperbedaan ㅤyang ㅤsangat ㅤkentara ㅤdan ㅤmendasar.[[42]](#footnote-42)

Dalam ㅤpemilihan ㅤumum, ㅤpemimpin ㅤpemerintahan ㅤterpilih ㅤyang ㅤmenduduki ㅤkursi ㅤeksekutif ㅤselain ㅤmerupakan ㅤwakil ㅤrakyat ㅤyang ㅤakan ㅤduduk ㅤdi ㅤparlemen ㅤatau ㅤlembaga ㅤperwakilan ㅤrakyat ㅤlainnya. ㅤAnggota ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤRakyat, ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤRakyat ㅤDaerah, ㅤdan ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤRakyat ㅤdi ㅤtingkat ㅤprovinsi ㅤdan ㅤkabupaten/kota ㅤmerupakan ㅤwakil ㅤrakyat ㅤdi ㅤlembaga ㅤlegislatif. ㅤPresiden ㅤdan ㅤwakil ㅤpresiden, ㅤgubernur ㅤdan ㅤwakil ㅤgubernur, ㅤbupati ㅤdan ㅤwakil ㅤbupati, ㅤserta ㅤwali ㅤkota ㅤdan ㅤwakil ㅤwali ㅤkota ㅤmerupakan ㅤpemimpin ㅤlembaga ㅤeksekutif ㅤyang ㅤdipilih ㅤlangsung ㅤoleh ㅤrakyat. ㅤSeiring ㅤdengan ㅤterselenggaranya ㅤpemilihan ㅤumum ㅤyang ㅤrutin ㅤdan ㅤberkala, ㅤmaka ㅤpejabat ㅤyang ㅤbersangkutan ㅤpun ㅤmengalami ㅤpergantian ㅤsecara ㅤrutin ㅤdan ㅤberkala. ㅤ

Dalam ㅤpemilihan ㅤumum, ㅤseorang ㅤpenguasa, ㅤpejabat, ㅤatau ㅤorang ㅤlain ㅤdipilih ㅤdengan ㅤcara ㅤmenuliskan ㅤnamanya ㅤpada ㅤselembar ㅤkertas ㅤatau ㅤdengan ㅤcara ㅤmemberikan ㅤsuaranya. ㅤSebaliknya, ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ8 ㅤTahun ㅤ2012 ㅤtentang ㅤPemilihan ㅤUmum ㅤAnggota ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤRakyat, ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤDaerah, ㅤdan ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤRakyat ㅤDaerah ㅤmenyatakan ㅤbahwa, ㅤsesuai ㅤdengan ㅤPancasila ㅤdan ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤNegara ㅤRepublik ㅤIndonesia ㅤTahun ㅤ1945, ㅤPemilihan ㅤUmum ㅤmerupakan ㅤcara ㅤyang ㅤlangsung, ㅤumum, ㅤbebas, ㅤrahasia, ㅤjujur, ㅤdan ㅤadil ㅤuntuk ㅤmelaksanakan ㅤkedaulatan ㅤrakyat ㅤdalam ㅤNegara ㅤKesatuan ㅤRepublik ㅤIndonesia.

Konstituen ㅤjuga ㅤdikenal ㅤsebagai ㅤpemilih ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤumum, ㅤdi ㅤmana ㅤpara ㅤkandidat ㅤmenyampaikan ㅤplatform ㅤdan ㅤjanji ㅤmereka ㅤselama ㅤkampanye. ㅤPada ㅤwaktu ㅤmenjelang ㅤhari ㅤpemilihan, ㅤkampanye ㅤdilakukan. ㅤProses ㅤpenghitungan ㅤsuara ㅤdimulai ㅤsetelah ㅤsuara ㅤdiberikan. ㅤAturan ㅤpermainan ㅤatau ㅤsistem ㅤpenentuan ㅤpemenang ㅤyang ㅤtelah ㅤdiputuskan ㅤdan ㅤdisetujui ㅤoleh ㅤpara ㅤpeserta ㅤdan ㅤdisebarluaskan ㅤkepada ㅤpara ㅤpemilih ㅤmenentukan ㅤsiapa ㅤyang ㅤmemenangkan ㅤpemilihan ㅤumum. ㅤDemokrasi ㅤmencakup ㅤproses ㅤpemilihan ㅤumum.[[43]](#footnote-43) ㅤ

Pemilihan ㅤumum ㅤlegislatif ㅤadalah ㅤpemilihan ㅤumum ㅤyang ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤwakil ㅤrakyat ㅤdi ㅤDPR, ㅤDPRD ㅤProvinsi, ㅤdan ㅤDPRD ㅤKabupaten/Kota. ㅤPemilihan ㅤumum ㅤlegislatif ㅤyang ㅤtata ㅤcaranya ㅤdiatur ㅤoleh ㅤperaturan ㅤperundang-undangan ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤcara ㅤuntuk ㅤmenjalankan ㅤkedaulatan ㅤrakyat ㅤdan ㅤmemilih ㅤwakil ㅤrakyat ㅤyang ㅤpaling ㅤdapat ㅤmewakili ㅤkepentingan ㅤrakyat. ㅤMeskipun ㅤrakyat ㅤdalam ㅤdemokrasi ㅤperwakilan ㅤmemiliki ㅤkedaulatan ㅤpenuh, ㅤnamun ㅤwakil ㅤrakyat ㅤmenjalankannya ㅤmelalui ㅤlembaga ㅤparlemen ㅤatau ㅤlegislatif.[[44]](#footnote-44)ㅤ

Dari ㅤuraian ㅤdi ㅤatas, ㅤdapat ㅤdisimpulkan ㅤbahwa ㅤpemilihan ㅤumum, ㅤyang ㅤjuga ㅤdiselenggarakan ㅤoleh ㅤnegara, ㅤmerupakan ㅤproses ㅤdi ㅤmana ㅤsuatu ㅤmasyarakat ㅤmemilih ㅤatau ㅤmenilai ㅤsikap ㅤwarga ㅤmasyarakatnya ㅤdalam ㅤrangka ㅤmemilih ㅤpemimpin ㅤatau ㅤpejabat ㅤpolitik ㅤyang ㅤakan ㅤmemerintah ㅤnegara.

1. **Hak ㅤPilih ㅤDalam ㅤPemilu**

Setiap ㅤwarga ㅤnegara ㅤIndonesia ㅤsecara ㅤteoritis ㅤberhak ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤumum. ㅤHak ㅤuntuk ㅤmemilih, ㅤyang ㅤmeliputi: ㅤ

1. Hak ㅤpilih ㅤaktif ㅤ(right ㅤto ㅤvote), ㅤadalah ㅤhak ㅤwarga ㅤnegara ㅤuntuk ㅤikut ㅤserta ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤumum. ㅤ
2. Hak ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤsecara ㅤpasif ㅤ(to ㅤbe ㅤchosen) ㅤPemilihan ㅤumum ㅤterbuka ㅤbagi ㅤsemua ㅤwarga ㅤnegara ㅤIndonesia ㅤyang ㅤberusia ㅤsekurang-kurangnya ㅤtujuh ㅤbelas ㅤtahun ㅤpada ㅤhari ㅤpemilihan ㅤdan ㅤyang ㅤtelah ㅤatau ㅤsedang ㅤmenikah. ㅤ

Setelah ㅤterdaftar ㅤsebagai ㅤpemilih, ㅤwarga ㅤnegara ㅤIndonesia ㅤyang ㅤmemenuhi ㅤsyarat ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤdapat ㅤmenggunakan ㅤhak ㅤtersebut.[[45]](#footnote-45) ㅤ

Seseorang ㅤyang ㅤtelah ㅤmempunyai ㅤhak ㅤmemilih, ㅤuntuk ㅤdapat ㅤterdaftar ㅤsebagai ㅤpemilih, ㅤharus ㅤmemenuhi ㅤpersyaratan:

1. Tidak ㅤmengalami ㅤgangguan ㅤingatan ㅤatau ㅤgangguan ㅤmental. ㅤ
2. Tidak ㅤsedang ㅤdicabut ㅤhak ㅤpilihnya ㅤberdasarkan ㅤputusan ㅤpengadilan ㅤyang ㅤtelah ㅤmempunyai ㅤkekuatan ㅤhukum ㅤtetap; ㅤsebaliknya, ㅤwarga ㅤnegara ㅤIndonesia ㅤyang ㅤtelah ㅤmasuk ㅤdalam ㅤDaftar ㅤPemilih ㅤTetap ㅤ(DPT) ㅤtetapi ㅤkemudian ㅤtidak ㅤlagi ㅤmemenuhi ㅤpersyaratan ㅤtersebut, ㅤtidak ㅤdapat ㅤmenggunakan ㅤhak ㅤpilihnya.

Isu ㅤdan ㅤkeresahan ㅤmenjelang ㅤpemilu ㅤkerap ㅤkali ㅤmuncul ㅤdi ㅤtengah ㅤmasyarakat. ㅤData ㅤpemilih ㅤyang ㅤtidak ㅤakurat ㅤmenjadi ㅤpenyebabnya. ㅤDi ㅤsisi ㅤlain, ㅤwarga ㅤyang ㅤtelah ㅤmeninggal ㅤdunia ㅤmasih ㅤtercantum ㅤdalam ㅤDaftar ㅤPemilih ㅤTetap ㅤ(DPT), ㅤpadahal ㅤsebagian ㅤwarga ㅤnegara ㅤyang ㅤtelah ㅤmemenuhi ㅤsyarat ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤtidak ㅤterdaftar. ㅤIsu ㅤini ㅤsebenarnya ㅤlebih ㅤbersifat ㅤadministratif ㅤdan ㅤteknis, ㅤnamun ㅤdipolitisasi ㅤoleh ㅤpihak-pihak ㅤyang ㅤkurang ㅤmampu, ㅤyang ㅤkerap ㅤkali ㅤberujung ㅤpada ㅤkeresahan ㅤdan ㅤkonflik.[[46]](#footnote-46) ㅤBerdasarkan ㅤpengamatan, ㅤketidakakuratan ㅤpemilih/DPT ㅤini ㅤdisebabkan ㅤoleh ㅤbeberapa ㅤfaktor, ㅤantara ㅤlain:

1. Pemerintah ㅤdalam ㅤhal ㅤini ㅤKementerian ㅤDalam ㅤNegeri ㅤbeserta ㅤjajarannya ㅤmemiliki ㅤkewenangan ㅤdan ㅤtanggung ㅤjawab ㅤuntuk ㅤmenyelenggarakan ㅤdata ㅤkependudukan ㅤdengan ㅤbaik. ㅤ
2. KPU ㅤbeserta ㅤjajarannya ㅤtidak ㅤmelakukan ㅤpemutakhiran ㅤdan ㅤverifikasi ㅤdata ㅤpemilih ㅤdengan ㅤbaik.
3. Masyarakat ㅤatau ㅤcalon ㅤpemilih ㅤdalam ㅤhal ㅤini ㅤtidak ㅤproaktif ㅤmengupayakan ㅤpencantuman ㅤdalam ㅤDaftar ㅤPemilih ㅤTetap ㅤ(DPT).
4. **Asas-Asas ㅤPemilu**

Pelaksanaan ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤumum ㅤasas-asas ㅤyang ㅤdigunakan ㅤdiantara ㅤsebagai ㅤberikut:[[47]](#footnote-47)ㅤ

1. Langsung, ㅤberarti ㅤpemilih ㅤdi ㅤmasyarakat ㅤbebas ㅤmenggunakan ㅤhak ㅤpilihnya ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤumum ㅤsesuai ㅤkeinginannya, ㅤtanpa ㅤperlu ㅤperantara. ㅤ
2. Umum, ㅤberarti ㅤsemua ㅤwarga ㅤnegara ㅤyang ㅤmemenuhi ㅤsyarat ㅤberhak ㅤmenggunakan ㅤhak ㅤpilihnya ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤumum ㅤtanpa ㅤmemandang ㅤagama, ㅤsuku, ㅤras, ㅤjenis ㅤkelamin, ㅤgolongan, ㅤpekerjaan, ㅤlokasi, ㅤatau ㅤkedudukan ㅤsosial ㅤlainnya.
3. Bebas, ㅤberarti ㅤsemua ㅤwarga ㅤnegara ㅤyang ㅤmemenuhi ㅤsyarat ㅤuntuk ㅤmenggunakan ㅤhak ㅤpilihnya ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤumum ㅤbebas ㅤmenyatakan ㅤpilihannya ㅤtanpa ㅤtekanan ㅤatau ㅤdiskriminasi ㅤdari ㅤpihak ㅤluar. ㅤ
4. Rahasia, ㅤberarti ㅤpilihan ㅤpemilih ㅤdirahasiakan ㅤselama ㅤproses ㅤpemilihan. ㅤPemilih ㅤmenggunakan ㅤsurat ㅤsuara ㅤuntuk ㅤmenggunakan ㅤhak ㅤpilihnya, ㅤdan ㅤtidak ㅤada ㅤorang ㅤlain ㅤyang ㅤmengetahui ㅤsiapa ㅤyang ㅤmenerimanya. ㅤ
5. Jujur, ㅤberarti ㅤsemua ㅤpihak ㅤterkait ㅤpemilu ㅤharus ㅤbertindak ㅤdan ㅤberperilaku ㅤterhormat ㅤsesuai ㅤdengan ㅤperaturan ㅤperundang-undangan ㅤyang ㅤberlaku. ㅤ
6. Adil, ㅤberarti ㅤtidak ㅤada ㅤkecurangan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤpihak ㅤmana ㅤpun ㅤdan ㅤsemua ㅤpemilih ㅤdan ㅤpeserta ㅤpemilu ㅤdiperlakukan ㅤsama ㅤselama ㅤproses ㅤpemilihan.
7. **Tinjauan ㅤUmum ㅤtentang ㅤPilkada**
8. **Pengertian ㅤUmum ㅤPilkada**

Asas-asas ㅤyang ㅤdianut ㅤtersebut ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤciri ㅤsistem ㅤPilkada ㅤyang ㅤdemokratis. ㅤAsas ㅤberfungsi ㅤsebagai ㅤlandasan ㅤdalam ㅤmempertimbangkan ㅤsuatu ㅤkeadaan ㅤatau ㅤcara ㅤdan ㅤsarana ㅤuntuk ㅤmewujudkan ㅤhubungan ㅤatau ㅤkeadaan ㅤyang ㅤdiinginkan. ㅤPemikiran ㅤuntuk ㅤmelaksanakan ㅤPilkada ㅤdiawali ㅤdengan ㅤasas ㅤPilkada. ㅤDengan ㅤkata ㅤlain, ㅤasas ㅤatau ㅤpedoman ㅤyang ㅤharus ㅤmenjadi ㅤpedoman ㅤdalam ㅤproses ㅤpenyelenggaraan ㅤdisebut ㅤasas ㅤPilkada. ㅤAsas ㅤPilkada ㅤjuga ㅤmengacu ㅤpada ㅤcara ㅤatau ㅤstrategi ㅤpenyelenggaraan ㅤPilkada ㅤsecara ㅤdemokratis. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤasas ㅤPilkada ㅤperlu ㅤditerjemahkan ㅤsecara ㅤteknis ㅤke ㅤdalam ㅤunsur-unsur ㅤkegiatan ㅤPilkada ㅤatau ㅤtercermin ㅤdalam ㅤtahapan-tahapan ㅤkegiatan[[48]](#footnote-48)

Pada ㅤtahun ㅤ2004, ㅤrakyat ㅤIndonesia ㅤberhasil ㅤmenyelenggarakan ㅤpemilihan ㅤumum ㅤlangsung ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤpresiden ㅤdan ㅤlegislatif, ㅤyang ㅤdilaksanakan ㅤsecara ㅤdemokratis ㅤdan ㅤtertib. ㅤSebagai ㅤhasil ㅤdari ㅤpencapaian ㅤini, ㅤmasyarakat ㅤmendorong ㅤpemilihan ㅤumum ㅤkepala ㅤdaerah ㅤsecara ㅤlangsung. ㅤMasyarakat ㅤmenuntut ㅤpemilihan ㅤumum ㅤkepala ㅤdaerah ㅤatau ㅤwakil ㅤkepala ㅤdaerah ㅤsecara ㅤlangsung. ㅤSebagai ㅤtanggapan, ㅤpemerintah ㅤmerevisi ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ32 ㅤTahun ㅤ2004 ㅤtentang ㅤPemerintahan ㅤDaerah.

"Gubernur, ㅤBupati, ㅤdan ㅤWalikota ㅤsebagai ㅤkepala ㅤpemerintahan ㅤdaerah ㅤprovinsi, ㅤkabupaten, ㅤdan ㅤkota ㅤdipilih ㅤsecara ㅤdemokratis," ㅤmenurut ㅤPasal ㅤ18 ㅤayat ㅤ4 ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤ(UUD) ㅤ1945. ㅤMenurut ㅤsalah ㅤsatu ㅤpandangan, ㅤpenerapan ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ22 ㅤTahun ㅤ2007 ㅤtentang ㅤPenyelenggara ㅤPemilu ㅤakhirnya ㅤmemungkinkan ㅤpemilihan ㅤkepala ㅤdaerah ㅤsecara ㅤlangsung ㅤmasuk ㅤke ㅤdalam ㅤrezim ㅤhukum ㅤpemilu. ㅤ

Frasa ㅤPilkada ㅤdiubah ㅤmenjadi ㅤPemilihan ㅤUmum ㅤKepala ㅤDaerah ㅤdan ㅤWakil ㅤKepala ㅤDaerah ㅤ(Pemilukada) ㅤsehingga ㅤjenis ㅤpemilu ㅤdi ㅤIndonesia ㅤbertambah ㅤmenjadi ㅤpemilu ㅤlegislatif, ㅤpresiden, ㅤdan ㅤdaerah. ㅤDiterimanya ㅤasas ㅤpemilu, ㅤyaitu ㅤlangsung, ㅤumum, ㅤbebas, ㅤrahasia, ㅤjujur, ㅤdan ㅤadil, ㅤsebagaimana ㅤyang ㅤtercantum ㅤdalam ㅤPasal ㅤ22E ㅤayat ㅤ(1) ㅤUUD ㅤ1945, ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤtanda ㅤbahwa ㅤpemilu ㅤdaerah ㅤtercakup ㅤdalam ㅤundang-undang ㅤpemilu.

Undang-Undang ㅤNomor ㅤ32 ㅤTahun ㅤ2004 ㅤtentang ㅤPemerintahan ㅤDaerah, ㅤkhususnya ㅤPasal ㅤ65 ㅤdan ㅤ66, ㅤmengatur ㅤproses ㅤpenyelenggaraan ㅤpemilihan ㅤkepala ㅤdaerah. ㅤPasal ㅤ65 ㅤayat ㅤ(4) ㅤmenyebutkan ㅤbahwa ㅤ“masa ㅤpersiapan ㅤpemilihan ㅤkepala ㅤdaerah ㅤdiatur ㅤoleh ㅤKPUD ㅤdengan ㅤmengacu ㅤpada ㅤPeraturan ㅤDaerah.” ㅤPemilihan ㅤkepala ㅤdaerah ㅤdan ㅤwakil ㅤkepala ㅤdaerah ㅤterdiri ㅤdari ㅤdua ㅤtahap, ㅤyaitu ㅤtahap ㅤpersiapan ㅤdan ㅤtahap ㅤpelaksanaan. ㅤDalam ㅤtahap-tahap ㅤtersebut ㅤterdapat ㅤbeberapa ㅤtahap ㅤpelaksanaan, ㅤyaitu:[[49]](#footnote-49)ㅤ

1. Penetapan ㅤdaftar ㅤpemilih; ㅤ
2. Pendaftaran ㅤdan ㅤPenetapan ㅤcalon ㅤkepala ㅤdaerah/wakil ㅤkepala ㅤdaerah; ㅤ
3. Kampanye;
4. Pemungutan ㅤsuara; ㅤ
5. Penghitungan ㅤsuara; ㅤ
6. Penetapan ㅤpasangan ㅤcalon ㅤkepala ㅤdaerah/wakil ㅤkepala ㅤdaerah ㅤterpilih, ㅤpengesahan, ㅤdan ㅤpelantikan.
7. **Tujuan ㅤdan ㅤFungsi ㅤPilkada**

Pemilihan ㅤkepala ㅤdaerah ㅤsecara ㅤlangsung ㅤatau ㅤpilkada ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤbentuk ㅤdemokrasi ㅤyang ㅤdilaksanakan ㅤdi ㅤberbagai ㅤdaerah. ㅤPilkada ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤcara ㅤuntuk ㅤmenunjukkan ㅤkedaulatan ㅤdan ㅤmemastikan ㅤbahwa ㅤmasyarakat ㅤdi ㅤdaerah ㅤtersebut ㅤadalah ㅤyang ㅤberhak ㅤmemberikan ㅤsuaranya. ㅤSelain ㅤitu, ㅤpilkada ㅤmemiliki ㅤtiga ㅤperan ㅤpenting ㅤdalam ㅤpenyelenggaraan ㅤpemerintahan ㅤdaerah, ㅤyaitu:[[50]](#footnote-50)

1. Pemilihan ㅤKepala ㅤDaerah ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤcara ㅤuntuk ㅤmempertanggungjawabkan ㅤkinerja ㅤKepala ㅤDaerah ㅤdan ㅤsebagai ㅤsarana ㅤuntuk ㅤmenilai ㅤserta ㅤmelakukan ㅤkontrol ㅤpolitik ㅤterhadap ㅤdirinya ㅤdan ㅤkekuatan ㅤpolitik ㅤyang ㅤmendukungnya. ㅤ
2. Pemilihan ㅤKepala ㅤDaerah ㅤyang ㅤdidasarkan ㅤatas ㅤkemauan ㅤkolektif ㅤmasyarakat ㅤdi ㅤdaerah ㅤdiharapkan ㅤmampu ㅤmemahami ㅤdan ㅤmewujudkan ㅤkeinginan ㅤmasyarakat ㅤdi ㅤdaerahnya. ㅤ
3. Masyarakat ㅤdi ㅤdaerah ㅤdiharapkan ㅤdapat ㅤmemilih ㅤKepala ㅤDaerah ㅤyang ㅤdidasarkan ㅤatas ㅤmisi, ㅤvisi, ㅤprogram, ㅤserta ㅤkualitas ㅤdan ㅤintegritas ㅤcalon ㅤKepala ㅤDaerah, ㅤkarena ㅤfaktor-faktor ㅤtersebut sangat ㅤmempengaruhi ㅤkeberhasilan ㅤpenyelenggaraan ㅤpemerintahan ㅤdi ㅤdaerah.

Melalui ㅤpemilihan ㅤkepala ㅤdaerah, ㅤrakyat ㅤdi ㅤdaerah ㅤmemiliki ㅤkekuatan ㅤuntuk ㅤmenentukan ㅤapakah ㅤorganisasi ㅤpolitik ㅤpendukungnya ㅤmasih ㅤdapat ㅤdipercaya ㅤdan ㅤapakah ㅤmandat ㅤseorang ㅤKepala ㅤDaerah ㅤharus ㅤdiperpanjang ㅤatau ㅤdiakhiri. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤagar ㅤpemilihan ㅤkepala ㅤdaerah ㅤdapat ㅤsepenuhnya ㅤmenjalankan ㅤperan ㅤdan ㅤfungsinya, ㅤsebagian ㅤbesar ㅤpelaksanaan ㅤpemilihan ㅤharus ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤdemokratis. ㅤKelemahan ㅤdan ㅤpelanggaran ㅤyang ㅤdapat ㅤmendistorsi ㅤdasar-dasar ㅤdemokrasi ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤkepala ㅤdaerah ㅤperlu ㅤdiperbaiki ㅤdan ㅤdihindari. ㅤMenurut ㅤpembukaan ㅤdan ㅤPasal ㅤ1 ㅤUndang-Undang ㅤDasar ㅤ1945, ㅤIndonesia ㅤmenjunjung ㅤtinggi ㅤasas ㅤkedaulatan ㅤrakyat, ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤpenyelenggaraan ㅤpemilihan ㅤumum ㅤpada ㅤwaktu ㅤtertentu ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤcara ㅤuntuk ㅤmewujudkan ㅤkedaulatan ㅤrakyat. ㅤKarena ㅤtujuan ㅤpemilihan ㅤumum ㅤadalah ㅤuntuk ㅤmemberikan ㅤkesempatan ㅤkepada ㅤrakyat ㅤuntuk ㅤmenggunakan ㅤhak-haknya, ㅤdengan ㅤmaksud ㅤ:[[51]](#footnote-51) ㅤ

1. Untuk ㅤmemilih ㅤwakil-wakilnya ㅤyang ㅤakan ㅤmenjalankan ㅤkedaulatan ㅤyang ㅤdimilikinya. ㅤ
2. Terbuka ㅤkemungkinan ㅤbaginya ㅤuntuk ㅤduduk ㅤdalam ㅤjabatan ㅤpemerintahan ㅤsebagai ㅤwakil ㅤyang ㅤdipercayakan ㅤoleh ㅤpemilihnya.

Salah ㅤsatu ㅤpilihan ㅤkelembagaan ㅤyang ㅤpaling ㅤpenting ㅤbagi ㅤnegara-negara ㅤyang ㅤingin ㅤmempertahankan ㅤeksistensi ㅤdan ㅤmutu ㅤsistem ㅤpolitik ㅤmereka ㅤadalah ㅤsistem ㅤpemilihan ㅤumum. ㅤKarena ㅤlogika ㅤpolitik ㅤuntuk ㅤproses ㅤadministratif, ㅤoperasi ㅤbirokrasi, ㅤdan ㅤperluasan ㅤserta ㅤpengembangan ㅤmasyarakat ㅤsipil ㅤdalam ㅤsistem ㅤtersebut ㅤakan ㅤdihasilkan ㅤoleh ㅤsistem ㅤpemilihan ㅤumum. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤpemilihan ㅤumum ㅤmerupakan ㅤalat ㅤyang ㅤampuh ㅤuntuk ㅤmemilih ㅤpemimpin ㅤnasional ㅤyang ㅤmencakup ㅤsetiap ㅤwarga ㅤnegara.[[52]](#footnote-52) ㅤ

Dewan ㅤperwakilan ㅤrakyat ㅤtidak ㅤsecara ㅤlangsung ㅤmelaksanakan ㅤpengambilan ㅤkeputusan ㅤyang ㅤberdaulat ㅤdari ㅤrakyat. ㅤKedaulatan ㅤdapat ㅤdiwujudkan ㅤsecara ㅤtidak ㅤlangsung ㅤmelalui ㅤsistem ㅤperwakilan. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤkepentingan ㅤmasyarakat ㅤseharusnya ㅤdiperhatikan ㅤdan ㅤdilibatkan ㅤdalam ㅤproses ㅤpenetapan ㅤkebijakan ㅤnegara, ㅤtermasuk ㅤyang ㅤdituangkan ㅤdalam ㅤperaturan ㅤperundang-undangan, ㅤpengawasan ㅤkinerja ㅤpemerintah, ㅤdan ㅤberbagai ㅤinisiatif ㅤlain ㅤyang ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤkepentingan ㅤmasyarakat.

1. **Tinjauan ㅤUmum ㅤtentang ㅤTindak ㅤPidana ㅤPemilu**
2. **Pengertian ㅤTindak ㅤPidana ㅤPemilu**

Konsep ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤtidak ㅤdijelaskan ㅤsecara ㅤgamblang ㅤdalam ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ15 ㅤTahun ㅤ2011 ㅤtentang ㅤPenyelenggara ㅤPemilu. ㅤSulit ㅤuntuk ㅤmerumuskan ㅤdefinisi ㅤyang ㅤtegas ㅤtentang ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu. ㅤTindak ㅤpidana ㅤpemilu, ㅤseperti ㅤhalnya ㅤterminologi ㅤhukum, ㅤtidak ㅤmemiliki ㅤrumusan ㅤtunggal ㅤyang ㅤdapat ㅤmemberikan ㅤpenjelasan ㅤatau ㅤpemahaman ㅤyang ㅤmenyeluruh ㅤtentang ㅤistilah ㅤtersebut ㅤdan ㅤdapat ㅤdigunakan ㅤsecara ㅤuniversal. ㅤMeskipun ㅤdemikian, ㅤmenurut ㅤsalah ㅤsatu ㅤdefinisi, ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ"setiap ㅤorang, ㅤbadan ㅤhukum, ㅤatau ㅤorganisasi ㅤyang ㅤdengan ㅤsengaja ㅤmelanggar ㅤhukum, ㅤmengganggu, ㅤmenghalangi, ㅤatau ㅤmengacaukan ㅤjalannya ㅤpemilihan ㅤumum ㅤyang ㅤdiselenggarakan ㅤberdasarkan ㅤundang-undang."[[53]](#footnote-53)

Menurut ㅤDjoko ㅤPrakoso, ㅤ"tindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤadalah ㅤsetiap ㅤorang/badan ㅤhukum ㅤatau ㅤkelompok ㅤyang ㅤdengan ㅤsengaja ㅤmelanggar hukum, ㅤmengganggu, ㅤmenghalangi, ㅤatau ㅤmencampuri ㅤpenyelenggaraan ㅤpemilihan ㅤumum ㅤyang ㅤdiselenggarakan ㅤmenurut ㅤundang-undang." ㅤDemikian ㅤdefinisi ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤyang ㅤditemukan ㅤdalam ㅤberbagai ㅤliteratur. ㅤDefinisi ㅤDjoko ㅤini ㅤlugas ㅤkarena ㅤdalam ㅤketentuan ㅤpidana ㅤundang-undang ㅤpemilu ㅤdisebutkan ㅤbahwa ㅤmencampuri, ㅤmenghalangi, ㅤatau ㅤmengganggu ㅤpenyelenggaraan ㅤpemilihan ㅤumum ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤdari ㅤberbagai ㅤjenis ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu.[[54]](#footnote-54)ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤTopo ㅤSantoso ㅤmenawarkan ㅤtiga ㅤpengertian ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu, ㅤyaitu:

1. Segala ㅤpelanggaran ㅤyang ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤpenyelenggaraan ㅤpemilu ㅤyang ㅤdiatur ㅤdalam ㅤUU ㅤPemilu. ㅤ
2. Segala ㅤpelanggaran ㅤyang ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤpenyelenggaraan ㅤpemilu ㅤyang ㅤdiatur ㅤdalam ㅤundang-undang ㅤPemilu ㅤdan ㅤundang-undang ㅤlainnya. ㅤ
3. Segala ㅤaktivitas ㅤilegal, ㅤtermasuk ㅤkekerasan, ㅤpelanggaran ㅤlalu ㅤlintas, ㅤvandalisme, ㅤdan ㅤpenyerangan, ㅤyang ㅤterjadi ㅤselama ㅤpemilu.[[55]](#footnote-55)ㅤ

Terdapat ㅤenam ㅤkategori ㅤsengketa ㅤhukum ㅤdan ㅤpelanggaran ㅤpemilu: ㅤ

1. pelanggaran ㅤpidana ㅤpemilu ㅤ(election ㅤcrimes); ㅤ
2. perselisihan ㅤselama ㅤproses ㅤpemilu; ㅤ
3. pelanggaran ㅤadministrasi ㅤpemilu; ㅤ
4. pelanggaran ㅤkode ㅤetik ㅤterhadap ㅤpenyelenggara ㅤpemilu;
5. Perbedaan ㅤpendapat ㅤhasil ㅤpemilu; ㅤdan ㅤ(6) ㅤsengketa ㅤhukum ㅤlainnya.
6. **Jenis-jenis ㅤTindak ㅤPidana ㅤPemilu**

Pasal ㅤ148, ㅤPasal ㅤ149 ㅤayat ㅤ(1) ㅤdan ㅤ(2), ㅤPasal ㅤ150, ㅤPasal ㅤ151, ㅤdan ㅤPasal ㅤ152 ㅤKitab ㅤUndang-Undang ㅤHukum ㅤPidana ㅤ(KUHP) ㅤmengatur ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤsebelum ㅤberlakunya ㅤUndang-Undang ㅤPemilu. ㅤSelain ㅤTindak ㅤPidana ㅤPemilu ㅤ(TPPU) ㅤyang ㅤdiatur ㅤdalam ㅤKUHP,[[56]](#footnote-56) ㅤUndang-Undang ㅤPemilihan ㅤUmum ㅤNomor ㅤ1 ㅤTahun ㅤ2017 ㅤmemuat ㅤaturan ㅤyang ㅤlebih ㅤlengkap ㅤdan ㅤtegas ㅤmengenai ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤpada ㅤBab ㅤII ㅤketentuan ㅤpidana ㅤPasal ㅤ488–544. ㅤBerikut ㅤini ㅤadalah ㅤbeberapa ㅤcontoh ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤ:[[57]](#footnote-57)ㅤ

1. Penyelenggara ㅤyang ㅤlalai ㅤatau ㅤtidak ㅤmenjalankan ㅤkewajibannya
2. Menggunakan ㅤdokumen ㅤpalsu ㅤ
3. Kampanye ㅤdiluar ㅤjadwal ㅤ
4. Kampanye ㅤditempat ㅤterlarang ㅤ
5. Menghilangkan ㅤhak ㅤpilih ㅤseseorang
6. Politik ㅤuang ㅤ
7. Mengganggu ㅤatau ㅤmenghamabat ㅤjalannya ㅤkampanye ㅤ
8. Mencoblos ㅤlebih ㅤdari ㅤsatu ㅤkali ㅤi. ㅤMerusak ㅤfasilitas ㅤpemilu ㅤ

Jenis-jenis ㅤtindak ㅤpidana ㅤpemilu ㅤdibahas ㅤdalam ㅤPasal ㅤ523 ㅤayat ㅤ(2) ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ7 ㅤTahun ㅤ2017 ㅤtentang ㅤPemilihan ㅤUmum ㅤjuncto ㅤPasal ㅤ278 ㅤayat ㅤ(2) ㅤhuruf ㅤd ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ7 ㅤTahun ㅤ2017 ㅤdan ㅤUndang-Undang ㅤNomor ㅤ8 ㅤTahun ㅤ1981, ㅤberdasarkan ㅤputusan ㅤperkara ㅤNomor: ㅤ83/Pid.Sus/2019/Pn.Sel ㅤtentang ㅤTindak ㅤPidana ㅤPemilu ㅤTahun ㅤ2019. ㅤDi ㅤantara ㅤpasal-pasal ㅤyang ㅤmengatur ㅤtentang ㅤancaman ㅤpidana ㅤbagi ㅤpelaku ㅤtindak ㅤpidana ㅤpolitik ㅤuang ㅤadalah ㅤPasal ㅤ278 ㅤdan ㅤPasal ㅤ523.[[58]](#footnote-58)

1. Politik ㅤUang

Politik ㅤuang ㅤsecara ㅤumum ㅤdipahami ㅤsebagai ㅤupaya ㅤseseorang ㅤuntuk ㅤmenggunakan ㅤimbalan ㅤtertentu ㅤguna ㅤmemengaruhi ㅤorang ㅤlain. ㅤInsentif ㅤtersebut ㅤdapat ㅤberupa ㅤuang ㅤtunai ㅤatau ㅤproduk ㅤtertentu. ㅤMenurut ㅤYusril ㅤIhza ㅤMahendra ㅤyang ㅤdikutip ㅤoleh ㅤIndra ㅤIsmawan, ㅤpolitik ㅤuang ㅤdilakukan ㅤuntuk ㅤmemengaruhi ㅤpemilih ㅤmelalui ㅤmanfaat ㅤyang ㅤnyata. ㅤMenurut ㅤsejumlah ㅤpakar ㅤpolitik ㅤuang ㅤ:[[59]](#footnote-59)

1. Johny ㅤLomulus ㅤmenganggap ㅤbahwa ㅤpolitik ㅤuang ㅤadalah ㅤpraktik ㅤpemberian ㅤsejumlah ㅤuang ㅤtertentu ㅤkepada ㅤpemilih ㅤatau ㅤpimpinan ㅤpartai ㅤpolitik ㅤuntuk ㅤmenjadikan ㅤmereka ㅤkandidat ㅤresmi ㅤdan/atau ㅤuntuk ㅤmendapatkan ㅤsuara ㅤpemilih ㅤguna ㅤmendukung ㅤkandidat ㅤyang ㅤdimaksud.
2. Menurut ㅤGary ㅤGoodpaster, ㅤpolitik ㅤuang ㅤpada ㅤhakikatnya ㅤadalah ㅤtransaksi ㅤsuap ㅤdi ㅤmana ㅤseorang ㅤkandidat ㅤmembeli ㅤsuara ㅤuntuk ㅤmemenangkan ㅤpemilihan.[[60]](#footnote-60)
3. Pelaku ㅤPolitik ㅤUang
4. Sebagaimana ㅤdijelaskan ㅤdalam ㅤPasal ㅤ523 ㅤAyat ㅤ2 ㅤpelaku ㅤpolitik ㅤuang ㅤdalam ㅤpemilihan ㅤcalon ㅤlegislatif ㅤyaitu ㅤDPRD ㅤProvinsi ㅤatau ㅤDPRD ㅤKabupaten/Kota ㅤialah ㅤsebagai ㅤberikut: ㅤ

“Sesuai ㅤdengan ㅤPasal ㅤ278 ㅤayat ㅤ2, ㅤsetiap ㅤpelaksana, ㅤpeserta, ㅤdan/atau ㅤtim ㅤKampanye ㅤPemilu ㅤyang ㅤdengan ㅤsengaja ㅤmenjanjikan ㅤatau ㅤmemberi ㅤimbalan ㅤuang ㅤatau ㅤmateril ㅤlainnya ㅤkepada ㅤpemilih ㅤpada ㅤmasa ㅤtenang, ㅤbaik ㅤsecara ㅤlangsung ㅤmaupun ㅤtidak ㅤlangsung, ㅤdipidana ㅤdengan ㅤpidana ㅤpenjara ㅤpaling ㅤlama ㅤempat ㅤ(empat) ㅤtahun ㅤdan ㅤdenda ㅤpaling ㅤbanyak ㅤRp48.000.000,00 ㅤ(empat ㅤpuluh ㅤdelapan ㅤjuta ㅤrupiah).”[[61]](#footnote-61)

1. Perundangan-undangan ㅤselanjutnya ㅤbunyi ㅤPasal ㅤ278 ㅤAyat ㅤ2 ㅤhuruf ㅤd

“Pelaksana, ㅤpeserta, ㅤdan/atau ㅤtim ㅤkampanye ㅤPemilu ㅤPresiden ㅤdan ㅤWakil ㅤPresiden ㅤdilarang ㅤmemberi ㅤjanji ㅤatau ㅤimbalan ㅤapa ㅤpun ㅤkepada ㅤpemilih ㅤselama ㅤmasa ㅤtenang ㅤsebagaimana ㅤdimaksud ㅤdalam ㅤPasal ㅤ276 ㅤ:

1. Tidak ㅤmenggunakan ㅤhak ㅤpilihnya; ㅤ
2. Memilih ㅤpasangan ㅤcalon;
3. Memilih ㅤpartai ㅤpolitik ㅤpeserta ㅤpemilu ㅤtertentu; ㅤ
4. Memilih ㅤanggota ㅤDPR, ㅤDPRD ㅤProvinsi ㅤdan ㅤDPRD ㅤkabupaten/kota ㅤtertentu; ㅤdan/atau; ㅤ
5. Memilih ㅤcalon ㅤanggota ㅤDPD ㅤtertentu.
6. Penjelasan ㅤPasal ㅤ523 ㅤayat ㅤ2 ㅤdan ㅤPasal ㅤ278 ㅤayat ㅤ2 ㅤhuruf ㅤd ㅤdapat ㅤdiuraikan ㅤsebagai ㅤberikut:
7. Penyelenggara/Pelaksana ㅤPemilu ㅤ

Penyelenggaraan ㅤpemilu ㅤadalah ㅤproses ㅤpenyelenggaraan ㅤberbagai ㅤtahapan ㅤpemilu ㅤoleh ㅤpenyelenggara ㅤpemilu. ㅤUntuk ㅤmemilih ㅤanggota ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤDaerah, ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤRakyat, ㅤPresiden, ㅤdan ㅤWakil ㅤPresiden, ㅤserta ㅤmemilih ㅤanggota ㅤDewan ㅤPerwakilan ㅤRakyat ㅤDaerah ㅤsecara ㅤlangsung ㅤoleh ㅤpemilih, ㅤpenyelenggara ㅤpemilu ㅤadalah ㅤorganisasi ㅤyang ㅤmengoordinasikan ㅤpemilu. ㅤOrganisasi ㅤyang ㅤdimaksud ㅤmeliputi ㅤKomisi ㅤPemilihan ㅤUmum, ㅤBadan ㅤPengawas ㅤPemilu, ㅤdan ㅤDewan ㅤKehormatan ㅤPenyelenggara ㅤPemilu.

1. Peserta ㅤPemilu ㅤ

sebagai ㅤcalon ㅤpejabat ㅤsesuai ㅤdengan ㅤpenjelasan ㅤPasal ㅤ1 ㅤAyat ㅤ27. ㅤPasangan ㅤcalon ㅤyang ㅤdiajukan ㅤoleh ㅤpartai ㅤpolitik ㅤatau ㅤgabungan ㅤpartai ㅤpolitik ㅤuntuk ㅤpemilihan ㅤpresiden ㅤdan ㅤwakil ㅤpresiden, ㅤserta ㅤanggota ㅤDPD, ㅤDPRD ㅤprovinsi, ㅤDPRD ㅤkabupaten/kota, ㅤdan ㅤpartai ㅤpolitik ㅤuntuk ㅤpemilihan ㅤanggota ㅤDPR, ㅤdianggap ㅤsebagai ㅤpeserta ㅤpemilu.

1. Tim ㅤKampanye ㅤ

Sesuai ㅤdengan ㅤpengertian ㅤyang ㅤtercantum ㅤdalam ㅤPasal ㅤ1 ㅤAyat ㅤ(23), ㅤ“tim ㅤkampanye” ㅤadalah ㅤsekelompok ㅤcalon ㅤyang ㅤberpasangan ㅤdengan ㅤpartai ㅤpolitik ㅤatau ㅤgabungan ㅤpartai ㅤpolitik ㅤyang ㅤbertugas ㅤmembantu ㅤmenyelenggarakan ㅤkampanye ㅤdan ㅤmengawasi ㅤpelaksanaan ㅤteknisnya.

1. Sengaja ㅤ

Disengaja ㅤ(opzet) ㅤmengacu ㅤpada ㅤkeinginan ㅤyang ㅤdisengaja ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤkejahatan ㅤtertentu ㅤ(keinginan ㅤyang ㅤdisengaja ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤkejahatan ㅤtertentu).

1. Masa ㅤTenang ㅤ

Masa ㅤTenang ㅤadalah ㅤmasa ㅤyang ㅤtidak ㅤdapat ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤaktivitas ㅤKampanye ㅤPemilu, ㅤ(Pasal ㅤ1 ㅤayat ㅤ36).

1. Imbalan

Hadiah ㅤsebagaimana ㅤdijelaskan ㅤdalam ㅤparagraf ㅤ2 ㅤPasal ㅤ278. ㅤIstilah ㅤ"hadiah" ㅤdapat ㅤmerujuk ㅤpada ㅤuang ㅤtunai, ㅤproduk, ㅤlayanan, ㅤatau ㅤbarang ㅤberwujud ㅤatau ㅤtidak ㅤberwujud ㅤlainnya ㅤyang ㅤmemiliki ㅤnilai ㅤmoneter.[[62]](#footnote-62)

1. Suratmin dan Iskandar, “No TitlePeran Politik Hukum Dalam,” *Journal Of Social Science Reseacrh* Vol 4 (2024): 63–74. [↑](#footnote-ref-1)
2. Iskandar. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2010). [↑](#footnote-ref-3)
4. Huda. [↑](#footnote-ref-4)
5. . [↑](#footnote-ref-5)
6. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ke (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002). [↑](#footnote-ref-6)
7. Wiesje Fenny Wilar, “Stakeholder Pemilu Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak,” *Jurnal Holistik*, 2019, 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002). [↑](#footnote-ref-8)
9. Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). [↑](#footnote-ref-9)
10. Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, “Electoral Justice System Assessment Guide,” *International IDEA*, 2019. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2007). [↑](#footnote-ref-11)
12. D Mulyadi, “Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu,” *Jurnal Ilmiah Galuh Jusitisi* 7 (n.d.): 16. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Pemilu Dan Demokrasi Terkonsolidasi, Catatan Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: PT. Epicentrum Mahadaya Komunika, 2014). [↑](#footnote-ref-13)
14. Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). [↑](#footnote-ref-14)
15. Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). [↑](#footnote-ref-15)
16. Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daeerah Langsung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). [↑](#footnote-ref-16)
17. A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013). [↑](#footnote-ref-17)
18. O Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5 No. (2020). [↑](#footnote-ref-18)
19. “Https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/11/06/211810778/Bawaslu-Jateng-Tangani-46-Pelanggaran-Pilkada-2-Kasus-Pidana-Diproses,” diakses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 16.45, n.d. [↑](#footnote-ref-19)
20. . [↑](#footnote-ref-20)
21. “Https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/11/06/211810778/Bawaslu-Jateng-Tangani-46-Pelanggaran-Pilkada-2-Kasus-Pidana-Diproses.” [↑](#footnote-ref-21)
22. Binov Handitya, “Peran Serta Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilihan Umum”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, Nomor 2” Vol. 4, No (2018). [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” [↑](#footnote-ref-23)
24. Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). [↑](#footnote-ref-24)
25. Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). [↑](#footnote-ref-25)
26. J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). [↑](#footnote-ref-26)
27. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008). [↑](#footnote-ref-28)
29. Soekanto. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hamdan Zoelva, “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” diakses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 21.45, n.d., www. setneg.go.id. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). [↑](#footnote-ref-31)
32. Nasef. [↑](#footnote-ref-32)
33. Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian* (Bandar Lampung: FH-UNILA, 1996). [↑](#footnote-ref-33)
34. Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002). [↑](#footnote-ref-34)
35. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur, 2004). [↑](#footnote-ref-35)
36. Machmud Syahrul, “Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 7 No. (n.d.). [↑](#footnote-ref-36)
37. Syahrul. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Grasindo, 2006). [↑](#footnote-ref-38)
39. Ramlan dan Kris Nugroho Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015). [↑](#footnote-ref-39)
40. “Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan\_umum,” n.d. [↑](#footnote-ref-40)
41. Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi* (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, 2004). [↑](#footnote-ref-41)
42. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2012). [↑](#footnote-ref-43)
44. Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Jakarta: Nadi Pustaka, 2017). [↑](#footnote-ref-44)
45. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif).* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009). [↑](#footnote-ref-45)
46. Abdullah. [↑](#footnote-ref-46)
47. Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. [↑](#footnote-ref-47)
48. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daeerah Langsung*. [↑](#footnote-ref-48)
49. Dkk Titi Anggraeni, *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Penyatuan UU No 32/2004, UU No. 12/2008, UU No. 15/2011, Dan UU No. 8/2012 Serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Satu Naskah* (Jakarta: Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem), 2014). [↑](#footnote-ref-49)
50. Yusdianto, “Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Mekanisme Penyelesaiannya,” *Jurnal Konstitusi* Vol. II no (n.d.). [↑](#footnote-ref-50)
51. Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik: (Edisi Revisi)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). [↑](#footnote-ref-51)
52. Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* (Yogyakarta: Total Media, 2009). [↑](#footnote-ref-52)
53. Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP* (Jakarta: Bina Aksara, 2008). [↑](#footnote-ref-53)
54. Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. [↑](#footnote-ref-54)
55. Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012); Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*. [↑](#footnote-ref-55)
56. Bambang Sugianto, “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 295, https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1046. [↑](#footnote-ref-56)
57. Sugianto; Firmansyah Arifin, “Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, no. 3 (2016): 348–64, https://doi.org/10.25105/prio.v4i3.390. [↑](#footnote-ref-57)
58. “Http://Bawaslu.Go.Id/En/Berita/Pelaku-Politik-Uang-Disanksi-Dikualifikasi-Dan-Pidana-Penjara Unduh,” http://bawaslu.go.id/en/berita/pelaku-politik-uang-disanksi-dikualifikasi-dan-pidana-penjara unduh, n.d., http://bawaslu.go.id/en/berita/pelaku-politik-uang-disanksi-dikualifikasi-dan-pidana-penjara unduh. [↑](#footnote-ref-58)
59. Sri Wahyu Ananingsih, “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45, N (2018). [↑](#footnote-ref-59)
60. Ananingsih. [↑](#footnote-ref-60)
61. Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. [↑](#footnote-ref-61)
62. Dr. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). [↑](#footnote-ref-62)